



EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

KKP  
2025  
PROGRESS TOGETHER

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

# LAPORAN KINERJA

Tahun 2025

Biro Perencanaan  
Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



(021) 3520337

JL. Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta Pusat

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 ini. Selanjutnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Jakarta, 16 Januari 2026

Kepala Biro Perencanaan



**Ditandatangani**  
**Secara Elektronik**

Andy Artha Donny Oktopura

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	8
BAB I PENDAHULUAN .....	9
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Tugas dan Fungsi.....	9
1.3 Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan.....	11
1.4 Potensi dan Tantangan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025-2029 .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	14
2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 .....	16
2.4 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Renja KKP 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Capaian Kinerja.....	21
IK 1: Nilai SAKIP KKP .....	22
IK 2: Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> .....	31
IK 3: Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang Teregister .....	36
IK 4: Capaian IKU KKP.....	40
IK 5: Capaian Prioritas Nasional KKP .....	43
IK 6: Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP .....	47
IK 7: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor KKP .....	49
IK 8: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP .....	52
IK 9: Nilai PM SAKIP Setjen .....	60
IK 10: Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru.....	64
IK 11: Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas .....	68
IK 12: Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan .....	70

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

IK 13: Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan .....	72
IK 14: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan .....	76
IK 15: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan .....	78
IK 16: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan .....	80
IK 17: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga .....	83
IK 18: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan .....	85
3.2 Kinerja Anggaran.....	86
3.3 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai Feedback Perbaikan Kinerja di Tahun 2026.....	88
3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025 .....	90
BAB IV PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA .....	91
4.1 Prestasi.....	91
4.2 Kinerja Lainnya .....	91
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Tindak Lanjut.....	94
LAMPIRAN .....	95

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025.....	14
Tabel 2.2 Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan Triwulan III Tahun 2025 dalam Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2025.....	16
Tabel 2.3 Renstra Setjen 2025–2029, Renja KKP 2025, dan PK Biro Perencanaan 2025 .....	20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 .....	22
Tabel 3.2 Capaian IKU 1.....	24
Tabel 3.3 Capaian IKU 2.....	32
Tabel 3.4 Hasil Pemantauan Proyek PHLN Triwulan III Tahun 2025 .....	33
Tabel 3.5 Capaian IKU 3 .....	37
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Register Pinjaman, Hibah dan SBSN Tahun 2025 .....	38
Tabel 3.7 Capaian IKU 4.....	41
Tabel 3.8 Capaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 .....	42
Tabel 3.9 Capaian IKU 5 .....	44
Tabel 3.10 Capaian IKU 6.....	48
Tabel 3.11 Capaian IKU 7.....	50
Tabel 3.12 Rekapitulasi Penilaian Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2024 .....	51
Tabel 3.13 Capaian IKU 8.....	54
Tabel 3.14 Capaian IKU 9.....	60
Tabel 3.15 Capaian IKU 10 .....	66
Tabel 3.16 Capaian IKU 11.....	68
Tabel 3.17 Rekapitulasi Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang Kelautan.....	69
Tabel 3.18 Capaian IKU 12 .....	71
Tabel 3.19 Capaian IKU 13 .....	73
Tabel 3.20 Rekapitulasi Nilai PM SAKIP Eselon II lingkup Setjen KKP Tahun 2025..	73
Tabel 3.21 Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan Tahun 2023–2025.....	74
Tabel 3.22 Capaian IKU 14.....	77
Tabel 3.23 IP ASN Lingkup Setjen Tahun 2025.....	77
Tabel 3.24 Capaian IKU 15.....	79

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

Tabel 3.25 Capaian IKU 16.....	81
Tabel 3.26 Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV tahun 2025 .....	82
Tabel 3.27 Capaian IKU 17.....	83
Tabel 3.28 Capaian IKU 18.....	86
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025 .....	87
Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025 .....	88
Tabel 3.31 Feedback Perbaikan Kinerja di Tahun 2026 .....	89

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP .....	11
Gambar 3.1 Dasbor Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 .....	21
Gambar 3.2 Nilai SAKIP KKP Tahun 2019-2025 .....	24
Gambar 3.3 Modul Pelatihan SAKIP melalui e-milea KKP.....	26
Gambar 3.4 Launching Pelatihan SAKIP melalui e-milea KKP .....	27
Gambar 3.5 Tampilan Fitur Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi pada Aplikasi Kinerja .....	28
Gambar 3.6 Rapat Penyempurnaan Pohon Kinerja.....	28
Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Kinerja menu Evaluasi SAKIP .....	29
Gambar 3.8 Pedoman Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2025 .....	29
Gambar 3.9 Rapat Reviu Laporan Kinerja Unit Organisasi Level II Setjen .....	61
Gambar 3.10 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal .....	62
Gambar 3.11 Piagam Penghargaan kepada Biro Hukum atas capaian NKO tertinggi ke – 1 pada Tahun 2024 lingkup Sekretariat Jenderal ....	62
Gambar 3.12 Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru Tahun 2023-2025 .....	66
Gambar 4.1 Piagam Penghargaan atas Capaian NKO Tertinggi ke 2 Lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan I Tahun 2025 .....	91
Gambar 4.2 Flyer Coaching Clinics SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal.....	92

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025..... 95  
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 Revisi Desember98

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, sekaligus untuk mengukur capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Perencanaan pada tahun 2025 tercatat sebesar **110,58%** dan memperoleh predikat **Istimewa** dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja sebesar 110,70%;
2. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga sebesar 114,94%; dan
3. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan sebesar 106,11%.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Biro Perencanaan memperoleh alokasi sebesar Rp62.494.539.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp762.845.000, sehingga pagu efektif yang tersedia berjumlah Rp61.731.694.000. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp60.407.471.363 atau 97,85% dari pagu efektif. Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam meningkatkan kualitas layanan internal, mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, Biro Perencanaan akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah strategis yang akan ditempuh meliputi penguatan tata kelola berbasis *outcome*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencapaian target kinerja Biro Perencanaan dan kontribusi terhadap kinerja Kementerian secara keseluruhan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan atas penggunaan anggaran pada tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2025 .

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud akuntabilitas atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal KKP, memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Perencanaan sebagai salah satu unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan lintas sektor serta program dan anggaran, koordinasi dan pengelolaan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan nonanggaran pendapatan dan belanja negara, kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis dan lintas sektor serta pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif;

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

- b. penyiapan koordinasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, dan peta jalan program prioritas Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan, sinkronisasi rencana, dan pelaporan program dan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dana transfer;
- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan revisi rencana kerja anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian;
- e. penyiapan koordinasi, analisis, formulasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pendanaan luar negeri;
- f. penyiapan koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi;
- g. penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan pemerintah daerah, serta lembaga nonpemerintah;
- h. penyiapan koordinasi, analisis, formulasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan kerja sama dan kolaborasi pendanaan inovatif nonanggaran pendapatan dan belanja negara;
- i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan bahan pimpinan dan data perencanaan;
- j. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Perencanaan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Biro Perencanaan.

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan menerbitkan Surat Tugas Nomor B.3685/SJ.1/TU.140/X/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 dengan susunan Tim Kerja sebagai berikut:

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP**

Sumber: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, 2025

### 1.3 Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan

Biro Perencanaan pada tahun 2025 memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 69 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, 49 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 orang adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 7 orang berasal dari tenaga Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan jenis kelamin, PNS terdiri atas 31 laki-laki dan 18 perempuan, PPPK terdiri atas 8 laki-laki dan 5 perempuan, sedangkan PJLP terdiri atas 5 laki-laki dan 2 perempuan. Dari sisi jabatan, ASN di Biro Perencanaan terbagi menjadi 1 orang Pejabat Struktural, 44 orang Pejabat Fungsional Tertentu, dan 17 orang Pejabat Fungsional Umum.

**Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin**

Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
PNS	31	18	49
PPPK	8	5	13
Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)	5	2	7
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>69</b>

Sumber: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, 2025

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### 1.4 Potensi dan Tantangan

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi dan tantangan yang dihadapi organisasi guna mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Biro Perencanaan memiliki beberapa potensi, antara lain:

- a. komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- b. peran strategis Biro Perencanaan dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan, yang menjadi acuan serta pedoman bagi pelaksanaan rencana kegiatan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP;
- c. tingginya kualifikasi pendidikan pegawai, sebagian besar telah menempuh pendidikan setingkat pascasarjana, yang menjadi modal utama dalam menunjang penyelesaian pekerjaan serta peningkatan kinerja, khususnya dalam penyusunan bahan pimpinan; dan
- d. penetapan Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan menghadapi tantangan berupa kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah memberikan manfaat yang maksimal. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut turut berdampak pada keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Selain itu, tekanan psikologis, stabilitas kerja, serta aspek kesejahteraan pegawai juga berpotensi terdampak oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan.

Dengan memahami potensi dan tantangan tersebut, Biro Perencanaan dapat mengoptimalkan perannya dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di sektor Kelautan dan Perikanan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025–2029**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, mandat Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” dengan sasaran utama yaitu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani serta Misi ke-4 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, maka Setjen KKP menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional”.

Setjen KKP sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Untuk mewujudkan Misi Setjen KKP Tahun 2025–2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP” dengan indikator meningkatnya Indeks RB KKP dari 90,05 pada Tahun 2025 menjadi 90,25 pada Tahun 2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen KKP Tahun 2025–2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program, yaitu (1) “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP” dan (2) “PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat”.

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 disahkan pada 24 Januari 2025. Sepanjang tahun 2025, Biro Perencanaan telah melakukan satu kali revisi yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2025 berupa perubahan target dan perubahan nomenklatur pada beberapa IKU pasca penetapan Renstra KKP 2025–2029. Data perubahan pada PK dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	PK Awal 25 Januari 2025		PK Revisi Akhir 2 Desember 2025		
		No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	1.	Nilai SAKIP KKP (nilai)	85	Nilai SAKIP KKP (nilai)	85
		2.	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk (persen)	< 59	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk (persen)	< 59
		3.	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister (persen)	95	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister (persen)	95
		4.	Capaian IKU KKP (nilai)	75	Capaian IKU KKP (nilai)	75
		5.	Capaian Prioritas Nasional KKP (nilai)	91	Capaian Prioritas Nasional KKP (nilai)	91
		6.	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada	1.8	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada	1.8
					Maturitas SPIP KKP (nilai)	

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

No.	Sasaran Kegiatan	No.	PK Awal 25 Januari 2025		PK Revisi Akhir 2 Desember 2025	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			PM Maturitas SPIP KKP (nilai)			
		7.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor (persen)	87	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor (persen)	83
		8.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP (indeks)	92	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP (indeks)	92
		9.	Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	87	Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	87
		10.	Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru (persen)	19,5	Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru (persen)	10
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga	11.	Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas (persen)	87	Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas (persen)	87
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	12.	Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan (persen)	85	Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan (persen)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	87	Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	87
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	87	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	82
		15.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (persen)	100	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (persen)	100
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (persen)	85	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (persen)	85
		17.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan <b>Peraturan Perundang-</b>	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan <b>Peraturan Menteri dan</b>	100

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

No.	Sasaran Kegiatan	No.	PK Awal 25 Januari 2025		PK Revisi Akhir 2 Desember 2025	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (persen)		Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (persen)	
		18.	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (persen)	95	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (persen)	95

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

### 2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Pelaksanaan pengelolaan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan dengan memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja triwulan sebelumnya. Berikut merupakan rincian pemanfaatan informasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan triwulan III dalam pengelolaan kinerja Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2025.

**Tabel 2.2 Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan Triwulan III Tahun 2025 dalam Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Triwulan III			Feedback	Pemanfaatan
			Target	Capaian	%		
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja							
1	Nilai SAKIP KKP	nilai	85	-	-	-	
2	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk	persen	≤ 59	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biro Perencanaan telah melakukan langkah percepatan penyerapan dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui penyampaian imbauan kepada masing-masing PIC dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi pada 7-8 Oktober 2025, serta melalui koordinasi dengan Eselon I selaku PIC Proyek, Kementerian Keuangan, dan Bappenas baik secara langsung maupun melalui rapat resmi, antara lain rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2025 dan rapat koordinasi lainnya.</li> <li>Telah disusun dasbor pemantauan progres penyerapan dana atas pinjaman dan hibah luar negeri.</li> <li>Menyampaikan konfirmasi penerimaan hibah dan status kegiatan yang dibiayai melalui hibah sampai dengan TW III</li> </ul>

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Triwulan III			Feedback	Pemanfaatan
			Target	Capaian	%		
							<p>kepada Kementerian Keuangan sesuai surat Nomor B.4372/SJ.1/RC.320/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan Permohonan Penutupan Hibah yang telah <i>fully disbursed</i> kepada Kementerian Keuangan sesuai surat nomor B.4372/SJ.1/RC.320/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025</li> </ul>
3	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister	persen	95	-	-	-	
4	Capaian IKU KKP	persen	75	-	-	-	
5	Capaian Prioritas Nasional KKP	persen	91	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan.</li> <li>Memantau tindak lanjut PPK BINS eks TIR Karawang atas kegiatan monitoring dan pemantauan yang telah dilaksanakan</li> <li>melaksanakan rapat lanjutan dengan PT. BHT untuk melakukan penyempurnaan dasbor;</li> <li>sosialisasi dasbor pemantauan dan evaluasi program prioritas kepada Eselon I terkait (PIC dan PPK) agar dapat segera dilakukan pengisian oleh Eselon I;</li> <li>paparan penyampaian progres pelaksanaan Pembangunan secara rutin setiap pekan; dan</li> <li>melakukan uji petik ke lapangan, terutama pada lokasi yang memiliki deviasi antara target dan realisasi serta lokasi-lokasi yang perlu perhatian khusus</li> </ul>
6	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP	nilai	1.8	-	-	-	<p>Pemenuhan dokumen pendukung penilaian pada Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri (PM) Penetapan Tujuan SPIP Tahun 2025</p> <p>Telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) atas PM Penetapan Tujuan SPIP Tahun 2025 pada tanggal 6 s.d.14 Oktober 2025</p>

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Triwulan III			Feedback	Pemanfaatan
			Target	Capaian	%		
7 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor	persen	87	-	-	-	Koordinasi dengan instansi terkait dan memastikan bahwa target di dalam RAN sesuai dengan Renstra KKP 2025-2029	Telah dilaksanakan rapat dengan BNP, BPIP, PDT, <i>Stunting</i> , pangan dan gizi, kepemudaan, GPI dan <i>Geopark</i>
8 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP	indeks	92	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Penetapan Renstra KKP 2025-2029</li> <li>Revisi Renja KKP TA 2025 yang menyeluruh sebaiknya dilakukan sebelum 31 Desember 2025 dan setelah ada kepastian pagu KKP TA 2025 pasca implementasi efisiensi anggaran dan ABT KKP TA 2025.</li> <li>Satker yang mengusulkan penambahan pagu anggaran diimbau untuk melaporkan melalui eselon 1 masing-masing dan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan rapat harmonisasi RPermen KP dengan melibatkan Kementerian Bappenas, Kemenkumham, Sektukab dan unit Eselon I KKP untuk persetujuan penetapan RPermen KP tentang Renstra KKP 2025-2029;</li> <li>Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.</li> </ul>
9 Nilai PM SAKIP Setjen	nilai	87	-	-	-		
10 Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru	persen	10	-	-	-		
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga							
11 Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas	persen	87	-	-	-		
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan							
12 Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan	persen	85	-	-	-		
13 Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan	nilai	87	-	-	-		
14 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan	indeks	82	-	-	-		

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Triwulan III			Feedback	Pemanfaatan	
			Target	Capaian	%			
15	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan	persen	100	-	-	-		
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan	persen	85	85	100	117,65		
17	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	persen	100	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan usulan RPermen Dekonsentrasi dan RKepmen Renja tahun 2026 kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal</li> <li>Koordinasi dengan Biro Hukum terkait Percepatan Penetapan Renstra KKP 2025-2029</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026.</li> <li>Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.</li> <li>Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.</li> </ul>
18	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan	persen	95	-	-	-		

Sumber: Evaluasi Rencana Aksi Biro Perencanaan Triwulan III Tahun 2025

### 2.4 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Renja KKP 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029 menjadi acuan setiap Unit Kerja Eselon II dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh IKU Biro Perencanaan, baik nomenklatur, target, maupun satuan, sudah ditetapkan selaras pada Renstra Setjen 2025-2029 dan Renja KKP 2025 dengan rincian sebagai berikut.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 2.3 Renstra Setjen 2025–2029, Renja KKP 2025, dan PK Biro Perencanaan 2025**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Renstra Setjen 2025–2029	Renja KKP 2025	PK Roren 2025
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	1 Nilai SAKIP KKP (nilai)	85	85	85
	2 Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (persen)	≤ 59	≤ 59	≤ 59
	3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister (persen)	95	95	95
	4 Capaian IKU KKP (nilai)	75	75	75
	5 Capaian Prioritas Nasional KKP (nilai)	91	91	91
	6 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (nilai)	1.8	1.8	1.8
	7 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor (persen)	83	83	83
	8 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP (indeks)	92	92	92
	9 Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	87	87	87
	10 Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru (persen)	10	10	10
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga	11 Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas (persen)	87	87	87
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan	12 Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan (persen)	85	85	85
	13 Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	87	87	87
	14 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	82	82	82
	15 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (persen)	100	100	100
	16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (persen)	85	85	85
	17 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (persen)	100	100	100
	18 Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (persen)	95	95	95

Sumber: Renstra Setjen Tahun 2025–2029, Renja KKP Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Perencanaan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di Biro Perencanaan dengan didasarkan atas perjanjian kinerja. Terhadap pencapaian kinerja tersebut telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan kesesuaian antara target dan realisasi yang dicapai. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Biro Perencanaan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yang dapat diakses melalui laman [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU oleh para penanggungjawab IKU.

Adapun Nilai Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 pada aplikasi kinerjaku adalah sebesar **110,58%** dan predikat **Istimewa**.



**Gambar 3.1 Dasbor Kinerjaku Biro Perencanaan Tahun 2025**

Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), 2025

Terdapat 18 Indikator Kinerja yang diperjanjikan Biro Perencanaan pada Tahun 2025, terdiri atas 11 IK utama dan 7 IK manajerial. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan disajikan sebagai berikut.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025**

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>SK.01</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja Organisasi</b>			<b>110,70</b>	
IKSK.01	Nilai SAKIP KKP	nilai	85	87,15	102,53
IKSK.02	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i>	persen	< 59	45,00	120,00
IKSK.03	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister	persen	95	220	120,00
IKSK.04	Capaian IKU KKP	nilai	75	85,71	114,28
IKSK.05	Capaian Prioritas Nasional KKP	nilai	91	98,77	108,54
IKSK.06	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP	nilai	1,8	2	111,11
IKSK.07	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor	persen	83	120	120,00
IKSK.08	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP	indeks	92	93,17	101,27
IKSK.09	Nilai PM SAKIP Setjen	nilai	87	89,60	102,99
IKSK.10	Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru	persen	10	12,75	120,00
<b>SK.02</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga</b>			<b>114,94</b>	
IKSK.11	Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas	persen	87	100	114,94
<b>SK.03</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan</b>			<b>106,11</b>	
IKSK.12	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan	persen	85	100	117,65
IKSK.13	Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan	nilai	87	89,25	102,59
IKSK.14	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan	indeks	82	87,36	106,54
IKSK.15	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan	persen	100	100	100,00
IKSK.16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan	persen	85	100	117,65
IKSK.17	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	persen	100	100	100,00
IKSK.18	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan	persen	95	97,85	103,00

Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), 2025

## IK 1: Nilai SAKIP KKP

### A. Definisi Indikator Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban.

Lebih dari itu, SAKIP disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja. SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PAN dan RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. SAKIP dapat membantu memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Besaran anggaran dialokasikan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.

Capaian Nilai SAKIP KKP diperoleh dari Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Apabila nilai SAKIP KKP dari Kementerian PAN dan RB belum dirilis sampai waktu pengukuran capaian IKU ini, maka capaian nilai SAKIP yang digunakan adalah angka hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal. Pengukuran Nilai SAKIP dilakukan secara tahunan.

#### B. Analisa Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Nilai SAKIP KKP dilakukan secara tahunan dan sampai saat penyusunan Laporan Kinerja ini, Kementerian PAN dan RB belum menyampaikan rilis capaian SAKIP, sehingga capaian menggunakan hasil penilaian mandiri dari Inspektorat Jenderal. Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal Nomor B.149/ITJ/HP.440/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus

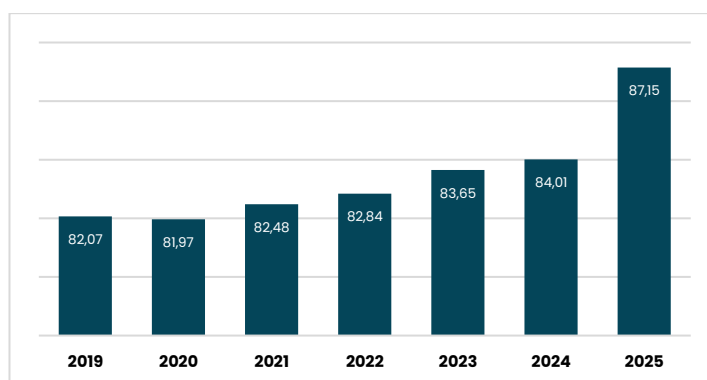
## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

2025 Hal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup KKP, Nilai SAKIP KKP adalah sebesar 87,15.

**Tabel 3.2 Capaian IKU 1**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja								
IKU-1:		Nilai SAKIP KKP								
Realisasi 2019–2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025–2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
82,07	81,97	82,48	82,84	83,65	84,01	85	87,15	102,53	85,2	102,29

Realisasi tersebut telah melampaui target tahunan dengan tingkat capaian sebesar 102,53% dan telah mencapai target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025–2029 dengan tingkat capaian sebesar 102,29%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja sebesar 3,14 poin. Berikut merupakan nilai SAKIP KKP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.



**Gambar 3.2 Nilai SAKIP KKP Tahun 2019–2025**

Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018–2025

Sampai dengan laporan ini disusun, KemenPAN dan RB belum menerbitkan hasil evaluasi SAKIP K/L, sehingga capaian SAKIP KKP belum dapat dibandingkan dengan capaian SAKIP K/L lainnya.

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

#### **C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Nilai SAKIP KKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KepmenKP) Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2025.
2. Telah ditetapkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebagaimana Permen KP Nomor 18 Tahun 2025.
3. Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja KKP Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan telah disepakati 13 Indikator Kinerja Tahun 2025 dan telah disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 17 Januari 2025.
5. Penyusunan rencana aksi yang akan dilakukan di Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja KKP Tahun 2025.
6. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Tahun 2024 dan telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB melalui surat Nomor B.269/MEN-KP/II/2024 tanggal Februari 2025 hal Penyampaian Laporan Kinerja KKP Tahun 2025 yang disampaikan secara digital melalui aplikasi [esr.sakip@menpan.rb](mailto:esr.sakip@menpan.rb).
7. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2024 dan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal pada 3 sampai dengan 7 Februari 2025. Seluruh rekomendasi Inspektorat Jenderal atas masukan terhadap Laporan Kinerja Setjen Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan telah diterbitkan pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.
8. Reviu Laporan Kinerja Lingkup KKP, Sekretariat Jenderal dan Unit Organisasi Level II Lingkup Setjen Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta substansi laporan kinerja.
9. Telah dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja KKP Tahun 2024 dan telah dilakukan Reviu laporan kinerja KKP Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal pada 17 sampai dengan 21 Februari 2025. Reviu dilakukan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.92/ITJ.3/KP.440/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 perihal Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada Biro Perencanaan di Provinsi DKI Jakarta.

10. Pembahasan penyusunan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan draft modul pelatihan SAKIP pada 31 Januari 2025 dengan pokok bahasan judul unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, indikator unjuk kerja, alokasi waktu, metode, mata diklat, tim penyusun modul dan judul materi bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi, Pusat Pelatihan KP dan Inspektorat III. Rencana pelatihan SAKIP akan dilakukan secara *Massive Online Open Courses* (MOOC) dalam aplikasi e-milea KKP.
11. Finalisasi Modul Pelatihan SAKIP pada 25 sampai dengan 26 Maret 2025 dengan agenda pembahasan finalisasi terhadap draft modul pelatihan SAKIP terdiri dari : (1) Model Dasar SAKIP, (2) Penjenjangan Kinerja, (3) Penyusunan Perencanaan Kinerja, (4) Pengukuran Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja, dan (6) Evaluasi Kinerja serta penyusunan soal-soal pelatihan SAKIP.



**Gambar 3.3 Modul Pelatihan SAKIP melalui e-milea KKP**

Sumber: e-milea, 2025

12. *Launching* pelatihan e-milea KKP modul SAKIP pada 4 Juni 2025 dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB. Terdapat 6 modul pelatihan yaitu Konsep Dasar SAKIP, Penjenjangan Kinerja, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja



**Gambar 3.4 *Launching* Pelatihan SAKIP melalui e-milea KKP**

Sumber: Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, 2025

13. Konsultasi SAKIP ke Kementerian PAN dan RB pada 14 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, KKP menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan Kementerian PAN dan RB dalam meningkatkan implementasi SAKIP di KKP. Tujuan konsultasi ini adalah untuk membahas tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP KKP Tahun 2024. Terdapat sembilan rekomendasi dalam evaluasi tersebut yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, agar dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh KKP. Beberapa rekomendasi membutuhkan pendalaman bersama Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB, serta memerlukan kolaborasi lintas K/L.
14. Telah dilakukan pemutakhiran tambahan menu pada aplikasi kinerjaku yaitu Menu Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi sehingga dapat dilakukan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Tahun	Indikator Kinerja	Target Kinerja Bulanan																	
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember						
1	Tujuan Pengakuan Kerjasama	2025	Sesuai																		
	Rencana Aksi																				
	Kondisi awal rencana penempatan Kerjasama-Kerjasama			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan rencana penempatan Kerjasama-Kerjasama			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Kerjasama-Kerjasama			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Penetapan 20 jenis budaya (Etnik) dan Pengakuan Kerjasama-Kerjasama (SKKA)			1.000.000.000,00	1,00	Dulunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lula Kerjasama-Kerjasama yang dilakukan melalui budaya (Etnik) dan Pengakuan Kerjasama-Kerjasama (SKKA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Penetapan 20 jenis budaya (Etnik) dan Pengakuan Kerjasama-Kerjasama (SKKA)			9.700.000.000,00	1,00	Dulunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etching nilai-nilai budaya (Etnik) dan Pengakuan Kerjasama-Kerjasama (SKKA) dan Dituangkan dalam Anggaran (SKKA)			0,00	1,00	Dulunya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revisi dan Penetapan Etching Pengakuan Kerjasama-Kerjasama (SKKA) dan Dituangkan dalam Anggaran (SKKA)			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

**Gambar 3.5 Tampilan Fitur Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi pada Aplikasi Kinerjaku**

Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), 2025

15. Telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2024 dan telah diunggah pada aplikasi [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.931/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP KKP Tahun 2024. KKP telah menindaklanjuti 9 rekomendasi Kementerian PAN dan RB.
16. Telah dilakukan rapat pembahasan penyempurnaan pohon kinerja dengan penjenjangan kinerja sampai dengan indikator kinerja individu dan dilengkapi informasi anggaran pada rincian output pada tanggal 11 – 13 Agustus 2025. Pohon kinerja telah disusun sesuai sasaran dan indikator yang tertuang pada rancangan Renstra KKP tahun 2025–2029.



**Gambar 3.6 Rapat Penyempurnaan Pohon Kinerja**

Sumber: Dokumentasi Tim Kerja Analisis Pengelolaan Kinerja, 2025

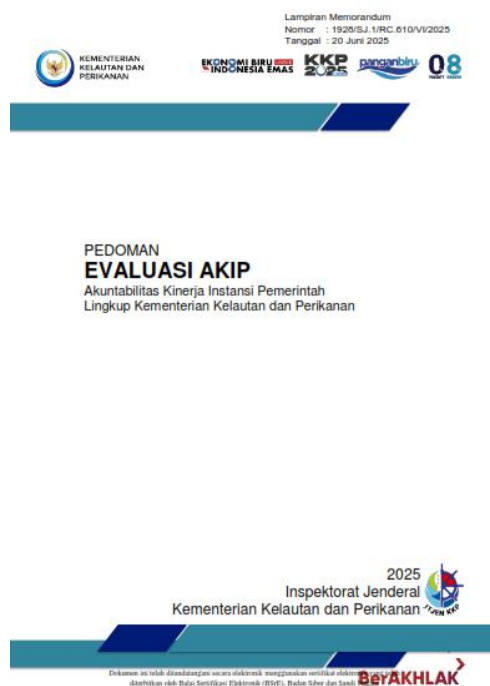
## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

17. Telah dilakukan penyusunan pedoman evaluasi SAKIP di Lingkup KKP

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (3PA)	PENGUKURAN KINERJA (3PA)	PELAKSANAAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT	TIL
1	000000000	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	+	+	+	+	0		Q
2	010000000	SEKRETARIAT JENDERAL KKP	28,00	30,00	7,50	25,00	91	AA	Q
3	020000000	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RIANG LAUT	18,00	18,00	9,30	15,75	61,45	B	Q
4	030000000	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	27,00	27,00	12,90	22,50	90,6	AA	Q
5	040000000	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA PERIKANAN	25,00	24,00	13,95	22,50	85,65	A	Q
6	050000000	DIREKTORAT JENDERAL PENGUJIAN DAYA SANGI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,00	24,00	14,25	22,50	87,3	A	Q
7	060000000	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	27,00	27,00	13,80	21,00	90	A	Q
8	070000000	INSPEKTORAT JENDERAL KKP	27,00	26,15	13,80	21,75	88,75	A	Q
9	080000000	BIDAN PENYALFAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,00	27,85	17,15	20,00	87,85	A	Q

**Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Kinerjaku menu Evaluasi SAKIP**

Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), 2025



**Gambar 3.8 Pedoman Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2025**

Sumber: Inspektorat Jenderal KKP, 2025

Dalam rangka mendukung ketercapaian Nilai SAKIP KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp234.388.000. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP KKP antara lain media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, *drive* penyimpanan *online* dan perangkat lunak *video conference*. Dengan

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

adanya efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi intensif dengan unit organisasi, dan pihak terkait (Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) melalui korespondensi persuratan dan rapat pembahasan secara daring.

#### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan implementasi SAKIP di KKP dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar semakin berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*).

##### 1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Menyelaraskan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja agar konsisten dan logis dari sasaran strategis hingga indikator kinerja, melakukan penajaman indikator kinerja utama (IKU) agar memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), memastikan keterkaitan yang kuat antara target kinerja dengan alokasi anggaran (*money follows program*).

##### 2. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja

Menyempurnakan definisi operasional, formula perhitungan, dan sumber data indikator kinerja, Meningkatkan keandalan data kinerja melalui penguatan sistem informasi kinerja dan validasi data secara berkala, Mengurangi indikator berbasis *output* dan mendorong penggunaan indikator berbasis *outcome*.

##### 3. Optimalisasi Pelaporan Kinerja

Menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang analitis, informatif, dan mampu menjelaskan keterkaitan antara capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta manfaat yang dihasilkan, Menampilkan analisis atas keberhasilan, kendala, dan langkah perbaikan secara komprehensif dan Memanfaatkan hasil pelaporan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

##### 4. Penguatan Evaluasi Kinerja Internal

Meningkatkan peran APIP dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP secara independen dan berkelanjutan, menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal secara tepat

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

waktu dan terukur, menggunakan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program.

### 5. Peningkatan Keterkaitan Kinerja dan Anggaran

Mendorong penganggaran berbasis kinerja melalui penajaman *output* dan *outcome* kegiatan, melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis, mengalokasikan sumber daya secara lebih proporsional pada program dan kegiatan prioritas.

### 6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SAKIP

Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan SAKIP secara berkelanjutan bagi unit kerja pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman pimpinan dan pelaksana terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja, mendorong terbentuknya budaya kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data.

### 7. Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan

Memperkuat peran pimpinan unit kerja dalam mengawal implementasi SAKIP, Menjadikan SAKIP sebagai instrumen manajemen, bukan sekadar kewajiban administrasi, Meningkatkan sinergi dan koordinasi antarunit kerja dalam pencapaian kinerja organisasi.

## IK 2: Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk*

### A. Definisi Indikator Kinerja

Untuk memberikan gambaran mengenai realisasi penyerapan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah/*Project Based Sukuk* (PBS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyusunan Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan *Project Based Sukuk* setiap triwulan. IKU Persentase Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berstatus *At Risk* akan mengukur persentase proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk* pada Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan *Project Based Sukuk* (PBS) yang disusun Kemenkeu.

Salah satu indikator kinerja yang diukur dalam laporan dimaksud adalah menggunakan *Project Variant* (PV). PV merupakan perbandingan antara persentase penarikan (*Disbursement Ratio/DR*) dengan persentase waktu terpakai (*Elapsed Time Ratio/ETR*). Berdasarkan indikator PV, status serapan PHLN dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan yang sudah ada penarikan

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

(*disbursed*), dan belum ada penarikan (*undisbursed*). Masing-masing status tersebut dikategorikan dalam beberapa level, yaitu:

- a. *Disbursed* (sudah ada penarikan)
  - i. *On and above schedule* ( $PV \geq 1$ ): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah telah sesuai, atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
  - ii. *Behind schedule* ( $0,3 < PV < 1$ ): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;
  - iii. *At Risk* ( $\leq 0,3$ ): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN
- b. *Undisbursed* (belum ada penarikan)
  - i. *Behind schedule* : ( $ETR \leq 70\%$  dari *Availability Period*)
  - ii. *At Risk* : ( $ETR > 70\%$  dari *Availability Period*)

### B. Analisa Capaian Kinerja

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 47,05%. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri Nomor 155/SJ.1/TU.140/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri, realisasi IKU pada tahun 2025 tercatat sebesar 45% sesuai dengan Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah dan Project Financing Sukuk Periode Triwulan III Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Realisasi tersebut telah melampaui target tahunan dengan tingkat capaian sebesar 120% dan telah mencapai target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja sebesar 2,05 poin.

**Tabel 3.3 Capaian IKU 2**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-2:		Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i>									
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	47	47,05	≤59	45	120	<55	100	

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan terhadap 180 kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN), tercatat 35 kegiatan berstatus *At Risk*. Jumlah kegiatan *At Risk* terbanyak terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 6 kegiatan, diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, secara jumlah proyek, KKP merupakan kementerian/lembaga dengan kegiatan PLN berstatus *At Risk* terbanyak kedua.

Sementara itu, dari 381 kegiatan yang dibiayai melalui Hibah Luar Negeri (HLN), terdapat 90 kegiatan berstatus *At Risk*. Status *At Risk* terbanyak juga tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan 16 kegiatan, sedangkan pada KKP terdapat 5 kegiatan berstatus *At Risk*. Dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, jumlah HLN *At Risk* pada KKP masih berada pada kelompok menengah, mengingat beberapa kementerian/lembaga lain menunjukkan proporsi *At Risk* yang lebih tinggi secara persentase meskipun jumlah proyeknya lebih sedikit.

Berikut merupakan rincian status proyek KKP sampai pada Triwulan III Tahun 2025.

**Tabel 3.4 Hasil Pemantauan Proyek PHLN Triwulan III Tahun 2025**

No	Nama Proyek/Kegiatan	Donor/Lender	Unit Kerja	Status
<b>PINJAMAN</b>				
1.	<i>Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)</i>	AFD	DJPT	<b>At Risk</b>
2.	<i>Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas (LAUTRA)</i>	World Bank	DJPRL	<b>At Risk</b>
3.	<i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)</i>	ADB	DJPB	<b>At Risk</b>
4.	<i>Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I</i>	IsDB	DJPT	<b>At Risk</b>
5.	<i>Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase II Preparation Project</i>	ADB	DJPT	<b>At Risk</b>
6.	<i>Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I</i>	JICA	DJPT	<b>Zero Disbursement</b>
7.	<i>Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)</i>	ICO dan BBVA	DJPSPKP	<b>Zero Disbursement</b>
8.	<i>Integrated Shrimp Farming (ISF)</i>	MUFG dan Mandiri Cayman Island	DJPB	<b>Zero Disbursement</b>
<b>HIBAH</b>				
9.	<i>Development of Analysis Tools and Marine and Fishery Resources Monitoring Technology</i>	CSIRO	Setjen	<b>At Risk</b>
10.	<i>Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia</i>	UNIDO	DJPSPKP	<b>At Risk</b>
11	<i>The Project for Promoting Sustainable Fisheries Development In Outer Islands of Indonesia</i>	JICA	BPPSDMKP	<b>At Risk</b>
12	<i>Usaid Bilateral Development Cooperation Framework (Bdcf) 497-ac-040 (The Implementation Of The Usaid Marine And Fisheries Portfolio)</i>	USAID	Setjen, DJPT, DJPB, DJPDS, DJPSPKP	<b>At Risk</b>

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

No	Nama Proyek/Kegiatan	Donor/Lender	Unit Kerja	Status
13.	<i>The Evidence Based and Sustainable Ocean Management in Indonesia</i>	AFD	DJPT	<b>At Risk</b>
14.	<i>The Programme For The Development Of Fisheries Sector In Outer Islands (Phase 2)</i>	JICA	Setjen	<b>On Schedule</b>
15.	<i>The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA): 715, 717 &amp; 718)</i>	WWF	DJPT	<b>Behind Schedule</b>
16.	<i>Technical Assistance on Gender Related Issues and Design and Support on The Implementation of Gender Action Plan at Eco Fishing Ports Locations</i>	AFD	DJPT	<b>Behind Schedule</b>
17.	<i>Technical Assistance To Support The Improvement Of The Management Of Fishing Gears Within The Framework Of The National Action Plan To Control Marine Debris In Indonesia</i>	AFD	DJPT	<b>Behind Schedule</b>
18.	<i>Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia (TOSCA)</i>	ADB	DJPB	<b>Behind Schedule</b>
19.	<i>Sustainable Management Of Fisheries Marine Living Resources, And Their Habitats In The Bay Of Bengal Region For The Benefit Of Coastal States And Communities (BOBLE ME II)</i>	FAO	DJPT	<b>Behind Schedule</b>
20.	<i>The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation (Indonesia – Korea)</i>	Ministry of Oceans and Fisheries Korea	DJPK	<b>Behind Schedule</b>
21.	<i>Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)</i>	World Bank	DJPK	<b>Behind Schedule</b>
22.	<i>Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Program (ATSEA 2); Second Phase of The Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program: Indonesia National Component</i>	UNDP	BPPSDMKP	<b>Behind Schedule</b>

Sumber: Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah dan Project Financing Sukuk Periode Triwulan III Tahun 2025 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

Biro Perencanaan mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab status *At Risk* pada proyek PHLN di lingkungan KKP, antara lain:

- DIPA diterima tidak tepat waktu sehingga waktu efektif pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas;
- Proses persetujuan pengadaan dari *lender* (AFD dan IsDB) yang memerlukan klarifikasi teknis dan administratif kompleks serta tidak selalu sejalan dengan siklus penganggaran APBN;
- Kesiapan proyek yang belum optimal pada awal tahun anggaran, termasuk dokumen perencanaan teknis, desain rinci (*detail engineering design*), kesiapan lokasi, dan paket pengadaan; serta
- Keterlambatan dimulainya kegiatan konstruksi dan pengadaan akibat proses finalisasi desain, penyesuaian kebijakan uang muka dan termin

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

pembayaran, penetapan lokasi, serta penyusunan dokumen pengadaan.

#### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, Biro Perencanaan melaksanakan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN Lingkup KKP  
Biro Perencanaan telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN Lingkup KKP setiap triwulan. Berdasarkan Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan Project Financing Sukuk Periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 5 dari 8 proyek pinjaman dan 5 dari 14 proyek hibah di lingkungan KKP yang berstatus *At Risk*.

- Pengendalian Internal dengan Pendekatan Manajemen Risiko Konteks "Pemantauan Proyek PHLN Lingkup Eselon I Pasca *Loan Effective*".

Biro Perencanaan telah melaksanakan pengendalian internal melalui pendekatan manajemen risiko dengan konteks Pemantauan Proyek PHLN Lingkup Eselon I Pasca *Loan Effective*. Hasil pengendalian tersebut telah disampaikan dalam Laporan SPIP Biro Perencanaan secara triwulanan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN selaku Ketua Tim Sekretariat Satgas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2025 serta Kepala Biro Umum.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp542.444.000. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp542.303.799 atau sebesar 99,97%. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi pada tahun mendatang, Biro Perencanaan akan melakukan upaya sebagai berikut.

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

- Melakukan fasilitasi dan koordinasi perencanaan proyek Pinjaman Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pemenuhan kesiapan proyek (*project readiness*).
- Memperkuat koordinasi antara Eselon I selaku PIC Proyek dengan Menteri Kelautan dan Perikanan guna memperoleh persetujuan dan dukungan pimpinan.

## IK 3: Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang Teregister

### A. Definisi Indikator Kinerja

Sesuai dengan PP 10 Tahun 2011 Pasal 74 ayat (3), setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Registrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sebelum melakukan pengesahan. Satker penerima PHLN harus memiliki nomor register atas PHLN yang diterima untuk mengesahkan dan melaporkan PHLN dalam laporan keuangan. KKP menerapkan kebijakan satu pintu sehingga setiap satker penerima PHLN akan melakukan permohonan pengajuan nomor register PHLN melalui Biro Perencanaan. Pendanaan Luar Negeri KKP terdiri dari Hibah dan Pinjaman. Mekanisme register untuk hibah dan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Hibah. Proses registrasi hibah dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI). Aplikasi ini digunakan untuk proses pengusulan hibah sampai dengan terbitnya persetujuan register oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
2. Pinjaman. Proses registrasi Pinjaman dilakukan secara manual kepada Kemenkeu hingga terbitnya persetujuan register.

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian IKU dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pinjaman dan Hibah yang diregister dengan permohonan register yang diajukan oleh Eselon I penanggung jawab. Namun, sesuai PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, proses penyusunan, penandatanganan perjanjian, hingga registrasi hibah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sehingga Eselon I tidak perlu mengajukan

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

permohonan register pinjaman. Menyesuaikan dengan proses bisnis tersebut, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian Manual terhadap IKU ini. Capaian IKU dihitung berdasarkan persentase realisasi Rencana Registrasi Dokumen Pendanaan Luar Negeri, yaitu dengan membandingkan antara jumlah kegiatan PHLN yang diregister pada tahun 2025 dengan rencana registrasi dokumen pendanaan luar negeri tahun 2025.

#### B. Analisa Capaian Kinerja

Realisasi IKU pada tahun 2024 tercatat sebesar 100%. Selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri Nomor 155/SJ.1/TU.140/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri, realisasi IKU pada tahun 2025 tercatat sebesar 220%. Capaian tersebut telah melampaui target IKU tahunan serta target jangka menengah dalam Renstra Setjen 2025–2029 dengan tingkat capaian sebesar 120%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 120 poin.

**Tabel 3.5 Capaian IKU 3**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-3:		Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister									
Realisasi 2019–2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025–2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	100	100	95	220	120	97	120	

Telah dilakukan registrasi atas 11 dokumen dari target 5 dokumen pada tahun 2025. Rincian Rencana Registrasi Dokumen Pendanaan LN Tahun 2025 dan realisasi Dokumen Pendanaan LN yang diregister tahun 2025 adalah sebagai berikut.

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

**Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Register Pinjaman, Hibah dan SBSN Tahun 2025**

RENCANA		REALISASI		
Kegiatan Pendanaan LN 2025	Jumlah Register	Kegiatan Pendanaan LN 2025	Jumlah Register	Nomor Register
<b>Pinjaman</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	
<i>Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)</i>	1	<i>Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)</i>	1	IWEY8UTA
<i>Integrated Shrimp Farming</i>	1	<i>Integrated Shrimp Farming (Jasa Konsultan Manajemen)</i>	1	INDBE4ZA
		<i>Integrated Shrimp Farming (Pekerjaan Konstruksi)</i>	1	IYZXEGCA
<b>SBSN</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2	Penyediaan <i>Fishing and Navigation Simulator</i> (Tahap II) untuk Menyediakan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas (Politeknik KP Karawang)	1	SBFL26AA
		<i>Fishing and Navigation Simulator</i> untuk Meningkatkan Efisiensi Pelatihan Awak Kapal Perikanan Tahun 2026 (BPPP Ambon Dan BPPP Bitung)	1	SBFL26AB
		<i>Fishing and Navigation Simulator</i> dan <i>Engine Simulator</i> dan <i>Basic Safety Training</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Awak Kapal Perikanan Indonesia (Politeknik KP Dumai)	1	SBFL26AC
		Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bertaraf Internasional Wilayah Timur (Makassar)	1	SBFM26AA
		Proyek Pengembangan Fasilitas Laboratorium Acuan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bertaraf Internasional (Cilangkap)	1	SBFM26AB
<b>Hibah</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	
The Project for Promoting Sustainable Fisheries Development in Outer Island of Indonesia	1	<i>The Project for Promoting Sustainable Fisheries Development in Outer Islands of Indonesia</i>	1	23ZNBHHA
		<i>Sustainable Management of Fisheries Marine Living Resources, and their Habitats in The Bay of Bengal Region for the Benefit of Coastal States and Communities</i>	1	2PSYT3SA
		<i>Technical Assistance to Support the Improvement of the Management of the National Action Plan to Control Marine Debris in Indonesia</i>	1	2ANJU5JA
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>		<b>11</b>	

Sumber: Paparan Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri Biro Perencanaan Tahun 2025

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, antara lain:

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

1. Melaksanakan koordinasi dalam proses perencanaan dan pengusulan registrasi Pinjaman, Hibah dan SBSN yang diajukan unit eselon I, baik internal maupun eksternal.
2. Melaksanakan analisa kesesuaian usulan registrasi Pinjaman, Hibah dan SBSN yang diajukan unit eselon I dengan kebijakan KKP dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun, dan menyampaikan usulan dokumen Registrasi Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Baru.
4. Memutakhirkan data registrasi Pinjaman, Hibah dan SBSN.
5. Memantau proses permohonan registrasi Pinjaman, Hibah dan SBSN secara berkala.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan capaian IKU pada periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan sejumlah upaya penyempurnaan kinerja, antara lain dengan memperkuat perencanaan awal usulan registrasi Pinjaman, Hibah, dan SBSN melalui penajaman kriteria kelengkapan dan kesiapan dokumen sejak tahap pengusulan oleh unit Eselon I. Selain itu, Biro Perencanaan akan meningkatkan kualitas analisis kesesuaian usulan dengan kebijakan KKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui penyusunan panduan teknis dan standar operasional proses registrasi.

Di samping itu, koordinasi dengan unit Eselon I serta kementerian/lembaga terkait akan terus diperkuat, baik melalui forum koordinasi rutin maupun komunikasi teknis, guna mempercepat proses klarifikasi dan penyelesaian kendala dalam permohonan registrasi Pinjaman, Hibah, dan SBSN.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### IK 4: Capaian IKU KKP

#### A. Definisi Indikator Kinerja

Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun perubahan *Road Map* RB Nasional yaitu adanya penajaman terhadap tujuan, sasaran, dan indikator RB. Pelaksanaan RB sebagaimana Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu (masalah tata kelola pemerintah/internal birokrasi), tetapi juga isu hilir (masalah yang muncul di masyarakat yang terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB Mikro diharapkan lebih komprehensif yang dikoordinasikan oleh Sekretariat K/L/D, sehingga antara general dan tematik tidak terkotak-kotak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi RB adalah Capaian Akuntabilitas Kinerja (10%) yang terdiri dari Capaian Prioritas Nasional (2%) dan Capaian Indikator Kinerja Utama (8%). Capaian IKU KKP ini menghitung capaian IKU pembangunan pada kementerian/lembaga dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU. Nilai Capaian IKU dipengaruhi oleh Nilai SAKIP dan Capaian Rencana Kerja Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional, dengan sumber data capaian dari Kementerian PAN dan RB dan dilakukan di akhir tahun.

#### B. Analisa Capaian Kinerja

Sampai saat pelaporan kinerja tahun 2025, capaian IKU KKP belum dirilis oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, perhitungan capaian indikator ini

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

sementara menggunakan hasil perhitungan mandiri oleh Biro Perencanaan. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Nomor 156/SJ.1/RC.610/I/2026 Tanggal 15 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Capaian IKU KKP Tahun 2025 adalah sebesar 85,71%. Tingkat ketercapaian IKU ini terhadap target tahunan adalah sebesar 114,28% dan terhadap jangka menengah sebesar 108,49%.

**Tabel 3.7 Capaian IKU 4**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-4:		Capaian IKU KKP									
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	78,95	75	85,71	114,28	79	108,49	

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang Capaian IKU KKP, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengukuran capaian kinerja secara berkala.
2. Evaluasi rencana aksi untuk memastikan pencapaian yang optimal.
3. Penyusunan laporan bulanan terkait kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru.
4. Penyusunan laporan kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkala.
5. Rapat pimpinan dengan agenda monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan prioritas, yang dipimpin oleh MKP dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.8 Capaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025**

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>SS.01</b>	<b>Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut</b>			<b>111,62</b>	
IKSS.01.01	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Juta ha	30	30,97	103,23
IKSS.01.02	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	persen	1	27,36	120,00
<b>SS.02</b>	<b>Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut</b>			<b>93,61</b>	
IKSS.02.01	PDB Perikanan	Triliun Rupiah	595,06	435,97	73,26
IKSS.02.02	Volume Produksi Perikanan	juta ton	24,58	26,26	106,83
IKSS.02.03	Volume Produksi Garam	juta ton	2,25	1,04	46,22
IKSS.02.04	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	indeks	0,49	0,5	102,04
IKSS.02.05	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	13,6	17,01	120,00
IKSS.02.06	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	indeks	82	87,8	107,07
IKSS.02.07	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi	Lembaga	4	4	100
<b>SS.03</b>	<b>Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk KP di Pasar Domestik dan Internasional</b>			<b>106,01</b>	
IKSS.03.01	Nilai Ekspor Produk Perikanan	USD miliar	6,25	6,17	98,72
IKSS.03.02	Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/tahun	26,26	26,08	99,31
IKSS.03.03	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan	persen	70	86,67	120,00
<b>SS.04</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM KP</b>			<b>105,71</b>	
IKSS.04.01	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	indeks	70	74	105,71
<b>SS.05</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas</b>			<b>101,83</b>	
IKSS.05.01	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	indeks	90,05	91,7	101,83

Sumber: Aplikasi Kinerja, 15 Januari

Selain itu, Biro Perencanaan telah melaksanakan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko "Pengukuran Capaian Kinerja KKP". Hasil pengendalian tersebut telah disampaikan dalam Laporan SPIP Biro

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

Perencanaan secara triwulanan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN selaku Ketua Tim Sekretariat Satgas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2025 serta Kepala Biro Umum.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan capaian IKU pada periode berikutnya:

1. Memastikan rencana aksi yang disusun di Tahun 2026 telah selaras mendukung pencapaian indikator kinerja.
2. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.

## **IK 5: Capaian Prioritas Nasional KKP**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah Capaian Akuntabilitas Kinerja (10%) yang terdiri dari Capaian Prioritas Nasional (2%) dan Capaian Indikator Kinerja Utama (8%). Capaian Prioritas Nasional dihitung dengan membandingkan jumlah indikator PN yang sesuai dan/atau melebihi target yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga terkait dengan total indikator PN yang menjadi tanggung jawab KKP. Penilaian dilakukan oleh Bappenas sebagai Evaluator Nasional. Capaian Prioritas Nasional KKP dihitung dalam desk evaluasi kinerja K/L Pendukung Prioritas Nasional (EKPN) yang dilaksanakan oleh Bappenas dengan menghitung Capaian PN KKP pada periode tahun sebelumnya dan dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Capaian PN KKP dihitung dengan menggunakan rata-rata 2 indikator pembentuk yaitu: Kinerja

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Efektivitas Sasaran Strategis K/L Pendukung PN Tahun 2025 dan Kinerja Efektivitas Dukungan Output K/L Pendukung PN Tahun 2025.

### B. Analisa Capaian Kinerja

Sampai dengan batas waktu pengukuran kinerja, nilai IKU ini belum dirilis oleh Evaluator. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Manual IKU, angka realisasi yang digunakan dalam pengukuran periode ini mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Nomor 183/SJ.1/TU.140/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Tahun 2024, capaian PN KKP dihitung melalui Desk Evaluasi Kinerja K/L Pendukung Prioritas Nasional (RKPN) Tahun 2023 yang dilaksanakan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan KKP memperoleh nilai 98,77.

**Tabel 3.9 Capaian IKU 5**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-5:		Capaian Prioritas Nasional KKP									
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	98,77	91	98,77	108,54	95	103,97	

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai target IKU ini, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut.

1. Pemantauan dan Evaluasi secara berkala terhadap Capaian Indikator PN melalui Aplikasi E-Monev Bappenas.
2. Pemantauan atas Capaian Rincian output (RO) Mendukung PN melalui aplikasi e-Monev Bappenas. Terdapat 233 RO Tagging Prioritas Nasional yaitu PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, PN 3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang).

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 pada tanggal 17 Februari - 18 Maret 2025 antara KKP dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah untuk menyepakati Indikator, Satuan dan Target pada *Outcome* dan Sub Kegiatan Tahun 2026 pada Desk Urusan Kelautan dan Perikanan dan volume, satuan, lokasi, dan usulan kegiatan pada Desk Kewilayahan.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

- Telah dilaksanakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta alokasi pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meminimalisir potensi duplikasi program/kegiatan pada RKP tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif tahun 2026 yang selektif, efisien dan bersifat *baseline* mencakup operasional, belanja wajib, dan difokuskan untuk mendukung direktif Presiden khususnya terkait percepatan pembangunan pergaraman nasional melalui Musrenbangnas Tahun 2025 tanggal 26 - 28 Mei 2025.
- Di sektor pembangunan kelautan dan perikanan, terdapat 77 usulan dari 31 Provinsi senilai Rp700,36 miliar. Namun, karena keterbatasan pagu indikatif tahun 2026, usulan yang dapat direkomendasikan adalah yang sesuai dengan direktif Presiden terkait percepatan pembangunan pergaraman nasional di Provinsi NTT.

5. Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas secara periodik melibatkan Tim Monev Program Prioritas, PIC masing-masing Program Prioritas, serta para penyuluh pendamping, baik dengan kunjungan lapangan, menggunakan dasbor, maupun instrumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun oleh Biro Perencanaan.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Beberapa upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja antara lain:

1. Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur dan mengikat bagi unit Eselon I, termasuk penjadwalan monev secara periodik serta penguatan peran *Person in Charge* (PIC) Program Prioritas.
2. Menyeragamkan periode *cut off* pelaporan progres capaian antar Program Prioritas guna meningkatkan konsistensi, keterbandingan, dan akurasi data kinerja.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-Monev Bappenas dan dasbor pemantauan internal sebagai instrumen utama monitoring capaian indikator dan rincian output pendukung Prioritas Nasional.
4. Menyusun panduan pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan Program Prioritas, khususnya bagi program yang masih berada pada fase pembangunan, sehingga penilaian kinerja tetap dapat dilakukan secara proporsional.
5. Memperkuat kapasitas dan ketersediaan SDM pemantauan dan evaluasi melalui pelibatan SDM yang berkompeten serta pengaturan pembagian peran yang lebih jelas antara tim perencana, tim monev, dan penyuluh pendamping.
6. Meningkatkan koordinasi lintas unit dan lintas sektor dalam rangka memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan capaian Program Prioritas Nasional.

## **IK 6: Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPI KKP yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Komponen penilaian Maturitas SPIP terdiri atas (a) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; (b) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan (c) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Biro Perencanaan bertanggungjawab atas Nilai Komponen Penetapan Tujuan yang memiliki bobot 40% pada Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP.

### **B. Analisa Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2025, Nilai Komponen Penetapan Tujuan SPIP adalah sebesar 2 dan telah melampaui target tahunan dan jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029 dengan nilai capaian sebesar 111,11%. Nilai ini belum

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

dapat dibandingkan dengan capaian Kementerian/Lembaga (K/L) lain, karena tidak tersedia data pembandingan mengenai penetapan tujuan dari K/L lain.

**Tabel 3.10 Capaian IKU 6**

Sasaran Kegiatan:						Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja					
IKU-6:						Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP					
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	1,8	2	1,8	2	111,11	1,8	111,11	

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Upaya Biro Perencanaan dalam meraih capaian IKU Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan unit organisasi eselon I untuk menyusun dan menyajikan data dalam Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kerja level 0, I, dan II;
2. Berkoordinasi dengan Tim Asesor SPIP KKP, Unit Eselon, dan Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan dalam melakukan PM serta Penjaminan Kualitas (PK) atas PM Maturitas SPIP.

Selain itu, Biro Perencanaan telah melaksanakan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko "Kualitas sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan komponen penetapan tujuan maturitas SPIP". Hasil pengendalian tersebut telah disampaikan dalam Laporan SPIP Biro Perencanaan secara triwulanan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN selaku Ketua Tim Sekretariat Satgas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2025 serta Kepala Biro Umum.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi) dan Rencana Aksi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KKP Tahun 2025 yaitu dengan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi kinerja untuk mengendalikan keselarasan penetapan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan di KKP.

## IK 7: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor KKP

### A. Definisi Indikator Kinerja

KKP mendukung perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai target-target nasional. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor KKP merupakan indikator keberhasilan perencanaan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini dihitung oleh Biro Perencanaan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan aspek yaitu:

- Proses pembahasan; yaitu evaluasi proses pembahasan dalam rangka penyelesaian dokumen yang dibahas bersama unit kerja KKP.
- Penyelesaian dokumen; yaitu evaluasi penyelesaian atau pemenuhan dokumen yang diminta oleh K/L lain.
- Ketepatan waktu; diukur dari ketepatan waktu penyampaian dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan oleh K/L terkait.

### B. Analisa Capaian Kinerja

Pada tahun sebelumnya, realisasi IKU ini adalah sebesar 97,31. IKU ini bersifat semesteran, dan realisasinya pada Semester I tercatat sebesar 99,28. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor Nomor 48/SJ.1/RC.330/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian IKU Tim Kerja APRSLS Semester II Tahun 2025, realisasi IKU ini adalah sebesar 120%. Realisasi ini telah melampaui target tahunan dan target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025–2029 dengan tingkat capaian sebesar 120%.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.11 Capaian IKU 7**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja								
IKU-7:		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor								
Realisasi 2019–2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025–2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	81,5	83	97,31	83	120	120	87	120

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan IKU ini, Biro Perencanaan telah melaksanakan penyusunan RAN terkait Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden, Evaluasi atas RAN, dan menyampaikan Laporan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawab KKP. Berikut merupakan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan lintas sektor di KKP sepanjang tahun 2025.

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan melaksanakan 11 kegiatan lintas sektor yang seluruhnya berjalan secara optimal. Kegiatan tersebut meliputi partisipasi aktif dalam berbagai agenda strategis nasional, antara lain RAN Gender dan Perubahan Iklim (GPI), percepatan penurunan *stunting*, RAN Pangan dan Gizi, RAN *Geopark*, RAN HAM, dukungan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT), peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, RAN Kepemudaan, rencana aksi Rancangan Peraturan Presiden mengenai RIDPN Morotai dan Wakatobi, serta RAN Gerakan Hidup Sehat.

Seluruh kegiatan lintas sektor tersebut telah dilaksanakan secara lengkap, mencakup tahapan pembahasan, penyelesaian dokumen, dan penyampaian dokumen pelaporan, dengan bobot penilaian masing-masing sebesar 50, 35, dan 15. Setiap kegiatan memperoleh nilai maksimal 100, sehingga total capaian kumulatif mencapai 1.100 poin, yang menunjukkan seluruh kewajiban lintas sektor telah dipenuhi secara tuntas dan tepat waktu. Peningkatan jumlah kegiatan lintas sektor dari target awal menjadi realisasi aktual sepanjang tahun pelaporan menjadi faktor utama yang mendorong nilai capaian melebihi target. Dengan demikian, capaian indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor dapat dikonversi sebagai capaian kinerja lebih dari 100 persen, hingga setara dengan 120 persen, sesuai dengan prinsip penilaian kinerja yang mengakomodasi tambahan *output* di luar target perencanaan awal.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Biro Perencanaan sebagai koordinator lintas sektor di lingkungan KKP, sekaligus menunjukkan kemampuan unit kerja dalam merespons dinamika kebijakan nasional secara adaptif. Kinerja tersebut memperkuat kontribusi KKP dalam mendukung agenda pembangunan lintas kementerian/lembaga dan menjadi dasar penguatan penilaian IKU dengan kategori sangat baik.

**Tabel 3.12 Rekapitulasi Penilaian Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2024**

No	Kegiatan Lintas Sektor	Tindak Lanjut KKP			Nilai
		Pembahasan	Penyelesaian Dokumen	Penyampaian Dokumen Pelaporan	
		50	35	15	
1	RAN Gender dan Perubahan Iklim (GPI)	50	35	15	100
2	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	50	35	15	100
3	RAN Pangan dan Gizi	50	35	15	100
4	RAN <i>Geopark</i>	50	35	15	100
5	RAN HAM	50	35	15	100
6	Dukungan di Kawasan Perbatasan	50	35	15	100
7	RAN Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)	50	35	15	100
8	Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	50	35	15	100
9	RAN Kepemudaan	50	35	15	100
10	Rencana Aksi Rancangan Peraturan Presiden mengenai RIDPN Morotai dan Wakatobi Tahun 2025-2044	50	35	15	100
11	RAN Gerakan Hidup Sehat	50	35	15	100
<b>Total</b>					<b>1100</b>
<b>Realisasi</b>					<b>122,22%</b>

Sumber: Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor Nomor 48/SJ.1/RC.330/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian IKU Tim Kerja APRSLS Semester II Tahun 2025

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan setiap triwulan untuk kegiatan lintas sektor. Sebagai contoh, pada kegiatan dukungan KKP terhadap Pengelolaan Kawasan Perbatasan, capaian realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 55,63 M atau 99 % dari total anggaran sebesar Rp 55,64 M, yang berasal dari Hibah luar negeri. Jenis kegiatan sektor KP yang dilakukan di kawasan perbatasan meliputi lanjutan Pembangunan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang di Provinsi

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

Aceh, SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, SKPT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, SKPT Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Pencapaian ini menunjukkan komitmen KKP terhadap Rencana Aksi (Renaksi) dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan perlu menyampaikan Laporan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawab KKP dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa target-target di dalam semua RAN telah sesuai dengan Renstra KKP 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut atas faktor pendorong dan penghambat tersebut, Biro Perencanaan akan melakukan penguatan mekanisme perencanaan dan pengendalian kegiatan lintas sektor melalui peningkatan koordinasi sejak awal tahun, penyempurnaan sistem pendokumentasian kinerja, serta penguatan kapasitas SDM perencana. Langkah ini diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan lintas sektor pada periode mendatang.

## **IK 8: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah tools evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi. Dasar hukum penilaian IPPN diatur dalam Surat Edaran

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023, yang menjadi pedoman pengukuran kualitas dokumen perencanaan. Selain itu, IPPN juga merupakan salah satu indikator dalam evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) General sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 Tahun 2024.

Tujuan penilaian IPPN adalah untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi, sinkron, dan sinergis dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan. Perencanaan yang baik memiliki konsistensi antara tujuan, anggaran, dan implementasi proyek, serta menjamin keterkaitan antar sektor dalam mencapai sasaran pembangunan. IPPN juga berfungsi untuk menganalisis korelasi antara *output* dan proyek yang dilaksanakan oleh K/L atau Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi sinergi yang diperlukan antar instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, IPPN menjadi alat penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas perencanaan pembangunan.

Mekanisme penilaian IPPN dilakukan langsung oleh Kementerian PPN/Bappenas tanpa memerlukan penilaian mandiri dari K/L atau Pemerintah Provinsi. Penilaian berlangsung dari Juni hingga November setiap tahunnya, dengan mengacu pada kertas kerja yang diformalkan dalam SE Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN dan menjadi komponen dalam evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 serta Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 Tahun 2024.

Dokumen utama yang dinilai meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L). Penilaian IPPN dilakukan dua kali, yaitu saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan program, untuk mengevaluasi keselarasan antara dokumen perencanaan dengan implementasinya. Penilaian IPPN mencakup tiga aspek utama: integrasi, sinkronisasi, dan keterhubungan antara perencanaan pembangunan dengan rencana kerja.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### B. Analisa Capaian Kinerja

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,12. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor Nomor 48/SJ.1/RC.330/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian IKU Tim Kerja APRSLS Semester II Tahun 2025, realisasi IKU pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,17 dan memperoleh predikat Sangat Baik.

**Tabel 3.13 Capaian IKU 8**

Sasaran Kegiatan:						Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja				
IKU-8:						Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP				
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	94,28	94,12	92	93,17	101,27	93,5	99,65

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,95 poin, namun realisasi tersebut telah melampaui target IKU tahunan dengan tingkat capaian sebesar 101,27. Terhadap target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029, tingkat capaiannya adalah sebesar 99,65%. Biro Perencanaan mengidentifikasi beberapa penyebab penurunan IPPN sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur kegiatan atau klasifikasi rincian output (KRO) dan RO pada awal tahun anggaran 2025 untuk menyesuaikan RPJMN 2025-2029 dan Renstra 2025-2029 yang terbit di akhir tahun 2025 pada poin penilaian sub indikator penilaian Ketidaksesuaian Pagu RKAKL dengan Renja K/L (Skor 8,10/10)
2. Adanya kebijakan efisiensi belanja (pencadangan anggaran) yang dilakukan setelah Renja K/L ditetapkan, namun penyesuaian pada sistem SAKTI (penganggaran) belum dilakukan. Hal ini menyebabkan sebagian anggaran yang semula ada alokasi anggaran menjadi tidak ada anggaran karena dianggap tidak mendukung *output* Prioritas Nasional. pada poin penilaian sub indikator penilaian Ketidaksesuaian Anggaran Output Prioritas dalam Koridor Prioritas Nasional (Skor 7,52/10)

Jika dibandingkan dengan beberapa K/L lain, posisi KKP menunjukkan kinerja yang relatif kuat dan kompetitif. Nilai IPPN KKP lebih tinggi dibandingkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI yang memperoleh skor

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

89,14 dengan predikat Baik, yang mengindikasikan bahwa aspek integrasi perencanaan dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan di KKP secara umum lebih optimal. Namun demikian, capaian KKP masih berada di bawah Komisi Yudisial yang meraih skor 96,5 dengan predikat Sangat Baik, sehingga masih terdapat ruang perbaikan. Secara keseluruhan, nilai IPPN 93,17 menempatkan KKP pada kelompok atas K/L dengan kualitas perencanaan yang baik, sekaligus menunjukkan bahwa praktik perencanaan telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan.

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian IKU ini pada tahun 2025 , telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan sasaran dan target indikator Renstra selaras dengan RPJMN; Renstra KKP Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2025 pada tanggal 3 November 2025.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Perencanaan
  - a. Telah dilaksanakan *Trilateral Meeting* Penyusunan Rencana Kerja KKP TA 2026 Pasca Alokasi Anggaran tanggal 4 Oktober 2025 dan telah ditetapkan melalui Kepmen-KP tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2026 tanggal 18 Desember 2025.
  - b. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 maka KKP telah melaksanakan TM RO Khusus TA 2026 pada tanggal 23 Desember 2025 untuk:
    - i. Mengusulkan KRO RO Khusus ((KRO FAN dan RO ZZI Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden)) untuk menampung alokasi anggaran TA 2026 yang dapat dimanfaatkan secara cepat dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden, dengan tata kelola tetap terjaga dan dilaporkan berkala kepada Presiden, sesuai Lampiran I S-817/MK.03/2025.
    - ii. Pemanfaatan KRO RO Khusus dapat dilakukan setelah ada direktif Presiden dan penetapan Surat Keputusan

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan pembentukan komponen baru (051, 052, dst.) dalam RO Khusus, pergeseran anggaran dari Komponen Khusus, serta pemenuhan persyaratan administrasi (SK, SPTJM, KAK, RAB, rekomendasi teknis, dan kelengkapan lain).

- iii. Alokasi KRO-RO Khusus yang tidak digunakan sampai akhir triwulan III dapat dialihkan ke kegiatan prioritas K/L melalui revisi anggaran, sedangkan dana non-RM hasil identifikasi dicantumkan sebagai blokir kode A; seluruh proses pembentukan, pengalokasian, dan pemanfaatan RO Khusus difasilitasi melalui Aplikasi SAKTI.

#### 3. Revisi Rencana Kerja Tahun Pelaksanaan

- a. Telah dilaksanakan *Trilateral Meeting* Revisi Rencana Kerja KKP TA 2025 Triwulan IV antara KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Telah dilaksanakan sinkronisasi Renja K/L-RKA K/L TA 2025 pada aplikasi KRISNA dan SAKTI untuk Pelaporan Triwulan IV paling lambat sebelum penutupan akses Renja K/L pada 31 Desember 2025; e-Monev Bappenas dengan sumber data KRISNA Renja, melalui mekanisme revisi dan approval pada SAKTI Modul Sinkronisasi dan Modul Anggaran bila ada revisi anggaran, lalu penarikan data ke KRISNA-Renja menggunakan fitur sync.
- c. Telah dilaksanakan pemutakhiran tagging Prioritas Nasional (PN) dan Informasi Kinerja di SAKTI Modul Sinkronisasi, serta pemutakhiran target Lokasi RO (lokus) dan Komponen tidak kosong dengan koordinasi unit perencanaan dan satker agar data perencanaan-penganggaran akurat dan sinkron.

#### 4. Penyelesaian Revisi Anggaran KKP Tahun Pelaksanaan

- a. telah dilaksanakan *one on one meeting* rekonstruksi efisiensi belanja kementerian/lembaga TA 2025 antara KKP dengan mitra kerja di DJA, Kementerian Keuangan, pada tanggal 13 Februari 2025, sebagai tindak lanjut rapat pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. KKP mengusulkan besaran efisiensi yang memungkinkan untuk dilakukan adalah sebesar Rp135 miliar.

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

- b. telah disampaikan surat Usulan Efisiensi Anggaran Belanja KKP TA 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Nomor B.148/MEN-SJ/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, dan Nomor B.167/MEN-SJ//RC.420/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 perihal Usulan Penyesuaian Efisiensi Anggaran Belanja KKP TA 2025, serta surat kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI tanggal 13 Februari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- c. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut usulan relaksasi anggaran KKP tahun 2025 pasca efisiensi belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2025, sesuai dengan surat usulan Nomor B.241/MEN-SJ/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. KKP mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran melalui pembukaan blokir sebesar Rp2.120.355.524.000.
- d. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan dukungan program penyelesaian modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang, sesuai dengan surat Nomor B.356/MEN-KP/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan surat Nomor B.451/MEN-KP/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 kepada Menteri Keuangan RI perihal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP Tahun 2025 dalam rangka Swasembada Pangan dan Garam Nasional.
- e. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan dukungan anggaran untuk program pembangunan *modelling* 100 Kampung Nelayan Merah Putih dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan surat Nomor B.840/MEN-KP/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 kepada Menteri Keuangan RI.
- f. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan dukungan anggaran untuk revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan kelautan dan perikanan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, sesuai

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

dengan surat Nomor B.678/MEN-KP/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 kepada Menteri Keuangan RI.

- g. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut usulan revisi anggaran Ditjen. Perikanan Tangkap TA 2025 kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor B.867/SJ/RC.420/IX/2025 tanggal 1 September 2025 terkait dengan perubahan cara penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Pembayaran Langsung (PL) menjadi Rekening Khusus (RK), pergeseran anggaran antarsatker dalam satu RO yang sama, dan pergeseran anggaran antarsatker antareselon I lingkup KKP.
- h. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut usulan perubahan mekanisme pengajuan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 35 Lokasi dan pelaksanaan *Multi Years Contract* pada tahun 2025 dan 2026, sesuai dengan surat Nomor B.1117/MEN-KP/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 kepada Menteri Keuangan.
- i. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan persetujuan pembukaan blokir hasil efisiensi anggaran belanja KKP TA 2025, sesuai dengan surat usulan surat Nomor B.1153/MEN-KP/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 kepada Menteri Sekretaris Negara, Nomor B.1163/MEN-KP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 kepada Menteri Keuangan, dan Nomor B.1213/MEN-KP/XI/2025 tanggal 11 November 2025 kepada Menteri Keuangan. KKP mengusulkan relaksasi hasil efisiensi anggaran melalui pembukaan blokir untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional KKP dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, pelayanan publik, kegiatan pendukung Program Prioritas Presiden, penguatan sistem pengawasan SDKP, pengadaan alat pengujian kandungan Cesium-137, dan pelayanan kesyahbandaran.
- j. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan tambahan anggaran Proyek *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS), sesuai dengan surat Nomor B.560/MEN-KP/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 kepada Menteri

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

Keuangan dan surat Nomor B.892/MEN-KP/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 kepada Ketua Komisi IV DPR RI perihal Usulan Penambahan Anggaran KKP TA 2025 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Spanyol - MFISS.

- k. telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis sebagai tindak lanjut permohonan tambahan pagu anggaran untuk Proyek *Integrated Shrimp Farming (ISF)* dan *Sector Loan for Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase I* TA 2025, sesuai dengan surat Nomor B.886/MEN-SJ/KU.530/XI/2025 tanggal 20 November 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, surat Nomor B.891/MEN-SJ/KU.530/XI/2025 tanggal 21 November 2025 kepada Ketua Komisi IV DPR RI.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, diperlukan peningkatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian nomenklatur kegiatan, KRO, dan RO sejak tahap penyusunan Renja agar selaras dengan RPJMN dan Renstra terbaru. Selain itu, akan dilakukan penguatan mekanisme rekonsiliasi pagu RKA-KL dengan Renja serta percepatan pemutakhiran data pada aplikasi SAKTI apabila terdapat kebijakan efisiensi atau perubahan alokasi anggaran. KKP juga akan meningkatkan kualitas penandaan *output* Prioritas Nasional, memperkuat koordinasi lintas unit Eselon I, serta mengoptimalkan pemanfaatan dasbor pemantauan perencanaan dan penganggaran guna memastikan konsistensi data dan meminimalkan potensi ketidaksesuaian pada proses penilaian IPPN. Perlu dibuat sistem yang dapat memonitor proses revisi dari seluruh satker di KKP baik itu revisi POK, Kanwil, Dit. PA, atau DJA.

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**IK 9: Nilai PM SAKIP Setjen**

**A. Definisi Indikator Kinerja**

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

**B. Analisa Capaian Kinerja**

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 87,98. Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Nomor T.248/ITJ.1/HP.440/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal, Nilai SAKIP Setjen sebesar 89,60. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 1,62 poin, namun realisasi tersebut telah melampaui target IKU tahunan dengan tingkat capaian sebesar 102,99. Terhadap target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025–2029, tingkat capaiannya adalah sebesar 102,05%.

**Tabel 3.14 Capaian IKU 9**

<b>Sasaran Kegiatan:</b>		<b>Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan</b>									
<b>IKU-9:</b>		<b>Nilai PM SAKIP Setjen</b>									
<b>Realisasi 2019–2024</b>						<b>Tahun 2025</b>			<b>Renstra Setjen 2025–2029</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Target 2029</b>	<b>% Capaian terhadap target akhir Renstra</b>	
-	-	-	-	81,71	87,98	87	89,60	102,99	87,8	102,05	

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Mempertahankan *best practice* yang telah menjadi keunggulan dalam penilaian SAKIP oleh Inspektorat I misalnya dasbor capaian dana bergulir pada LPMUKP, dasbor capaian pada Biro Hukum
2. Melakukan pemenuhan dokumen SAKIP lingkup Setjen secara berkala dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja
3. Melakukan pendampingan kepada Unit Organisasi Eselon II Lingkup Setjen terhadap 4 aspek penilaian SAKIP yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
4. Melakukan reviu Laporan Kinerja Unit Organisasi Level II Setjen pada 21 sampai dengan 22 Januari 2025

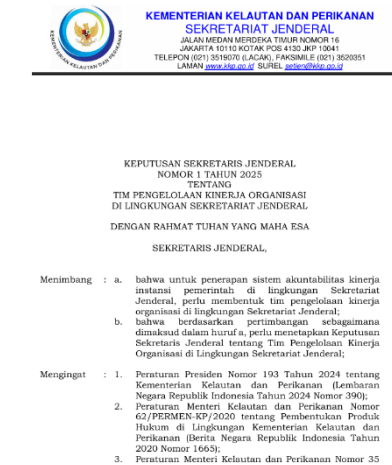


**Gambar 3.9 Rapat Reviu Laporan Kinerja Unit Organisasi Level II Setjen**

Sumber: Dokumentasi Tim Kerja Analisis Pengelolaan Kinerja, 2025

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

5. Telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal



**Gambar 3.10 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal**

Sumber: jdih.kkp.go.id, 2025

6. Penyampaian Penghargaan kepada Unit Organisasi Eselon II Lingkup Setjen yang mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai bentuk *reward* kepada unit organisasi atas implementasi SAKIP yang terus meningkat.



**Gambar 3.11 Piagam Penghargaan kepada Biro Hukum atas capaian NKO tertinggi ke – 1 pada Tahun 2024 lingkup Sekretariat Jenderal**

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2025

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

7. Persiapan evaluasi SAKIP Lingkup Setjen dengan mengundang seluruh Unit Organisasi Eselon II.
8. Sosialisasi fitur baru pada aplikasi kinerjaku mencakup fitur Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, dan
9. Pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam Evaluasi SAKIP dalam aplikasi eSAKIP reviu milik Kementerian PAN dan RB.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Untuk meningkatkan capaian Nilai PM SAKIP Setjen ke depan, Biro Perencanaan akan melakukan:

1. Pemenuhan dokumen SAKIP Unit Organisasi Level II Lingkup Setjen pada *platform* [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id), aplikasi kinerjaku dan *drive* SAKIP Setjen.
2. Pemberian *reward* untuk Satker yang memperoleh capaian kinerja terbaik.
3. Reviu Laporan Kinerja level II lingkup Setjen setiap Triwulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta substansi laporan kinerja.
4. Pembahasan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025.
5. Penguatan Perencanaan Kinerja: Menyelaraskan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja antara RPJMN, Renstra KKP, Perjanjian Kinerja, hingga rencana aksi unit kerja agar lebih fokus pada *outcome* dan dampak.
6. Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Menyederhanakan dan memastikan IKU bersifat SMART, terukur, dan mencerminkan hasil (*outcome*), bukan hanya *output* kegiatan.
7. Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja: Memperkuat validitas data kinerja, konsistensi metode pengukuran, serta ketepatan

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

waktu pelaporan melalui pemanfaatan sistem informasi kinerja terintegrasi.

8. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev): Melaksanakan monev kinerja secara berkala dan berjenjang, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program.
9. Peningkatan Akuntabilitas Anggaran: Mendorong keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja (*money follows program*), sehingga anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis.
10. Penguatan Kapasitas SDM Kinerja: Meningkatkan kompetensi ASN pengelola kinerja melalui pelatihan SAKIP, *coaching*, dan asistensi teknis secara berkelanjutan.
11. Penguatan Peran Pimpinan: Mendorong keterlibatan aktif pimpinan dalam pengendalian kinerja, evaluasi capaian, serta pengambilan keputusan berbasis kinerja.

## IK 10: Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru

### A. Definisi Indikator Kinerja

Pembangunan kelautan dan perikanan saat ini dititikberatkan pada pentingnya implementasi ekonomi biru. Dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dan implementasi ekonomi biru, KKP memiliki 5 kebijakan prioritas yaitu: (i) Memperluas Kawasan konservasi laut; (ii) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (iii) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat berkelanjutan; (iv) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (v) pengendalian sampah plastik di laut.

Implementasi kebijakan Ekonomi Biru KKP sejalan dan selaras dengan 8 misi Asta Cita, yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang di tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Secara umum, kebijakan penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai solusi,

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

diperlukan inovasi pembiayaan yang memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan legal untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah mendorong keterlibatan badan usaha, swasta dan lembaga lainnya turut serta dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. KKP perlu mengembangkan kolaborasi berbagai skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif yang merupakan inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, Biro Perencanaan menetapkan IKU "Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif". IKU ini menghitung peningkatan jumlah pendanaan kolaboratif dan inovatif yang terealisasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber anggaran pendanaan kolaboratif dan inovatif berasal dari Mitra yang terdiri dari Pemerintah dan Non Pemerintah. Jenis Pendanaan Mitra terdiri dari KPBU/PPP, Tematik Bond, BPD LH, BUMN dan Swasta, Filantropi, NGO, Perguruan Tinggi, Pemda, Kementerian/Lembaga terkait.

#### **B. Analisa Capaian Kinerja**

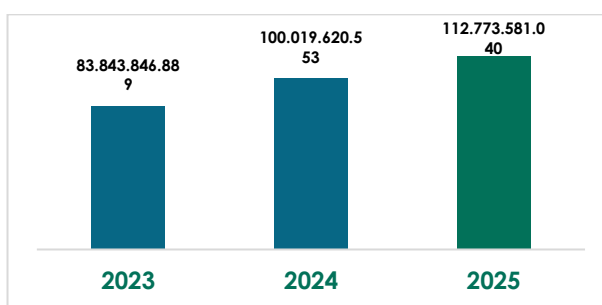
Realisasi IKU ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,30%. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif Nomor 141/SJ.1/KS.310/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif, realisasi IKU pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,75%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 6,55 poin, namun realisasi tersebut telah melampaui target IKU tahunan dengan tingkat capaian sebesar 120%. Terhadap target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029, tingkat capaiannya adalah sebesar 70,83%.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.15 Capaian IKU 10**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga								
IKU-10:		Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru								
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	19,30	10	12,75	120	18	70,83

Biro Perencanaan mengidentifikasi bahwa anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif pada tahun 2025 adalah sebesar Rp112.773.581.040, meningkat sebesar Rp12,7 miliar dari tahun sebelumnya.



**Gambar 3.12 Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru Tahun 2023-2025**

Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024-2025

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah melakukan inventarisasi kelembagaan serta verifikasi dan rekonsiliasi terkait alokasi pendanaan yang dapat mendukung *Blue Economy*. Pencapaian peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif didukung beberapa hal yaitu:

1. Regulasi pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung pendanaan ekonomi biru, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Beberapa inisiatif penting yang telah diluncurkan termasuk Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Keuangan. Panduan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan Instrumen

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

pendanaan biru seperti obligasi biru dan sukuk biru, yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

2. Beberapa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan dalam Implementasi Ekonomi Biru antara lain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pemanfaatan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Hibah yang diperoleh dari lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, CSR dan atau Filantropis
3. Regulasi khusus dalam mengatur mekanisme pendanaan yang berasal dari Non APBN dan kolaborasi arah kebijakan visi dan misi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung ketercapaian target IKU ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp205.044.000 dengan kegiatan utama Inventarisasi Lembaga atau Instansi yang melakukan kegiatan pendanaan kolaboratif dan inovatif serta Rekonsiliasi jumlah pendanaan kolaboratif dan inovatif dengan Mitra. Realisasi anggaran ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp204.743.824 atau sebesar 99,85%.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan mencari peluang kolaborasi berbagai skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif yang merupakan inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**IK 11: Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas**

**A. Definisi Indikator Kinerja**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 23/Permen-KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP, kerja sama didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga, badan, atau organisasi guna mendukung kinerja KKP. IKU Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas diukur melalui PM oleh Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga dengan membandingkan jumlah ruang lingkup dalam suatu kerja sama yang mendukung program prioritas KKP dengan total jumlah ruang lingkup kerja sama tersebut.

**B. Analisa Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini mencapai 87%. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif Nomor 141/SJ.1/KS.310/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif, realisasi IKU pada tahun 2025 tercatat sebesar 100%. Realisasi tersebut telah melampaui target IKU tahunan dengan tingkat capaian sebesar 114,94% dan target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029 dengan tingkat capaian sebesar 113,64%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja sebesar 13 poin.

**Tabel 3.16 Capaian IKU 11**

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga								
IKU-11:		Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas								
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	87	87	100	114,94	88	113,64

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah melaksanakan pemutakhiran dokumen kerja sama KKP dengan Mitra sesuai dengan struktur organisasi dan nomenklatur terbaru. Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, Biro Perencanaan telah melaksanakan rapat pembahasan terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi kerja sama.

**Tabel 3.17 Rekapitulasi Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap Program Prioritas**

No	Unit Kerja	Ruang Lingkup yang mendukung Ekonomi Biru	Total Ruang Lingkup	Persentase Kontribusi (%)
1	Setjen	71	71	100
2	Itjen	6	6	100
3	DJPK	105	105	100
4	DJPT	118	118	100
5	DJPB	43	43	100
6	DJPDSPKP	80	80	100
7	DJPSPDKP	39	39	100
8	BP2SDMKP	79	79	100
9	BP2MHKP	48	48	100
		<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100</b>

Sumber: Nota Dinas Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif Nomor 141/SJ.1/KS.310/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif

Selain itu, Biro Perencanaan telah melaksanakan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko "Penyusunan dokumen kerja sama antarlembaga". Hasil pengendalian tersebut telah disampaikan dalam Laporan SPIP Biro Perencanaan secara triwulanan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN selaku Ketua Tim Sekretariat Satgas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2025 serta Kepala Biro Umum.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 10. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Pada *drafting* atau perpanjangan kerja sama selanjutnya, perlu disusun ruang lingkup kerja sama yang mendukung program prioritas.
2. Perlu dilakukan konfirmasi dan *update* berkelanjutan pada matriks Pemantauan Ruang Lingkup Dokumen Kerja Sama.

## IK 12: Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan

### A. Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka Implementasi PermenKP No. 62/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), diperlukan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, serta dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik. Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebuah upaya untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Kerja ZI berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP, Biro Perencanaan telah ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang telah berpredikat menuju WBK. Guna kesinambungan serta peningkatan komitmen unit kerja dalam melaksanakan pelayanan tugas dan fungsi maka dibutuhkan penyusunan rencana kerja setiap tahunnya serta monitoring evaluasi pelaksanaan rencana kerja dari seluruh aspek pembangunan zona integritas baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Capaian IKU dinilai dengan membandingkan antara rencana kerja yang terlaksana dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan selama tahun 2025.

### B. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Monitoring dan Pemantauan Program Prioritas Nomor 392/SJ.1/TU.140/II/2026 Tanggal 06 Februari 2026 Hal Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBK Biro Perencanaan Tahun 2025, Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi ini telah melampaui target IKU tahunan dan target jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029 sebesar 117,65%.

**Tabel 3.18 Capaian IKU 12**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-12:		Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan									
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	85	100	117,65	85	117,65	

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah melakukan pemantauan semesteran terhadap Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan serta melakukan perbaikan dan *updating* dokumen pendukung pelaksanaan pembangunan ZI.

Dalam rangka mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini dan beberapa IKM lainnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.435.655.000. Namun dengan adanya Inpres I tahun 2025, terdapat

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

efisiensi anggaran mencapai Rp9.950.568.000 sehingga sisa anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp485.087.000. Realisasi hingga Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp461.546.021 atau sebesar 95,15%.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan. Selanjutnya Biro Perencanaan juga akan menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil pemantauan antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun dan mengembangkan dasbor monitoring dan evaluasi untuk memantau progres capaian unggah dokumen data dukung secara berkala.
2. Membentuk kembali Tim Pelaksana WBK Biro Perencanaan guna mengisi kekosongan keanggotaan pasca mutasi beberapa personel.
3. Melaksanakan sosialisasi slogan WBK melalui pencantuman narasi komitmen WBK dalam surat undangan kegiatan Biro Perencanaan.
4. Mendorong seluruh pegawai Biro Perencanaan untuk lebih aktif dan konsisten dalam memperbarui serta mengunggah data dukung pada media penyimpanan bersama yang telah disediakan.

## **IK 13: Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Terdapat 4 komponen penilaian di dalam evaluasi SAKIP, yakni

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### B. Analisa Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, nilai PM SAKIP Biro Perencanaan adalah sebesar 87,70 (A) dengan Predikat Memuaskan. Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal nomor B.913/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, Biro Perencanaan memperoleh nilai sebesar 89,25 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (memuaskan).

**Tabel 3.19 Capaian IKU 13**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-13:		Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan									
Realisasi 2019–2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025–2029		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2025	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	85,40	87,70	87,00	89,25	102,59	87,8	101,65	

Biro Perencanaan bersama Biro Hukum dan Biro Umum meraih capaian tertinggi lingkup Setjen. Berikut merupakan Rekapitulasi Nilai PM SAKIP Eselon II lingkup Setjen KKP Tahun 2025.

**Tabel 3.20 Rekapitulasi Nilai PM SAKIP Eselon II lingkup Setjen KKP Tahun 2025**

Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
Biro Hukum	27.60	26.10	13.80	21,75	89.25	A
Biro Perencanaan	27.60	26.10	13.80	21,75	89.25	A
Biro Umum	27.60	26,1	13,8	21,75	89.25	A
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	27.00	25,5	13.50	21,25	87,25	A
Pusat Data dan Informasi	27.00	24.60	13.05	22.50	87,15	A
Biro Keuangan dan BMN	27.00	24.60	13.05	22.50	87,15	A
Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	26,1	24,6	13.80	22,5	87	A
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan	26,1	24,6	13.80	22,5	87	A
Biro Hubungan Masyarakat Dan Kerja Sama Luar Negeri	26,1	24,6	13.80	22,5	87	A
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	26,1	24,6	13.80	22,5	87	A

Sumber: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, 2025

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Realisasi ini telah melampaui target tahunan dengan tingkat capaian sebesar 102,59% dan target jangka menengah dalam Renstra Setjen Tahun 2025-2029 dengan tingkat capaian sebesar 101,65%. Realisasi ini meningkat sebesar 1,55 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut adalah rekapitulasi hasil PM SAKIP Biro Perencanaan Tahun 2023, 2024, dan 2025.

**Tabel 3.21 Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan Tahun 2023-2025**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	25,80	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80	13,80	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,50	21,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		100	<b>85,40</b>	<b>87,70</b>	<b>89,25</b>
<b>Predikat Penilaian</b>			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan 2023-2025

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian nilai PM SAKIP Biro Perencanaan ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan).
2. Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan *dicascading* level atas dengan level di bawahnya.
3. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, dan rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
4. Rekonsiliasi telah dilakukan secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

5. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
6. Dalam pemenuhan kriteria pengukuran kinerja, telah dilakukan verifikasi online capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku
7. Laporan Kinerja Biro Perencanaan telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
8. Substansi Laporan Kinerja Biro Perencanaan telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
9. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.
10. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024.
11. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 12. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur serta

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja.

## **IK 14: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Pada ketentuan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, profesionalitas didefinisikan sebagai kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

- Dimensi Kualifikasi, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi Kompetensi, untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- Dimensi Kinerja, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN; serta
- Dimensi Disiplin, untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN.

### **B. Analisa Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, Realisasi IKU ini adalah sebesar 86,97. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 8/SJ.3/TU.210/1/2026 Tanggal 4 Januari 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

sebesar 87,36. Realisasi ini telah melampaui target tahunan dengan tingkat capaian sebesar 106,54 dan target jangka menengah sebesar 104%.

**Tabel 3.22 Capaian IKU 14**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan								
IKU-14:		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan								
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	93,21	62,25	84,86	87,19	86,97	82,00	87,36	106,54	84	104

Realisasi ini menempatkan Biro Perencanaan di peringkat kedelapan dari sebelas Eselon II yang diukur pada tahun 2025. Berikut merupakan IP ASN lingkup Setjen tahun 2025.

**Tabel 3.23 IP ASN Lingkup Setjen Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
2	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
3	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
4	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
5	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
6	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
9	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
10	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
11	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
	<b>Total</b>	<b>21,71</b>	<b>34,37</b>	<b>26,18</b>	<b>5</b>	<b>88,37</b>

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 Tanggal 4 Januari 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN, Biro Perencanaan telah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menyampaikan kewajiban peningkatan IP ASN kepada setiap pegawai melalui apel pagi;

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

2. Sosialisasi Peningkatan Kinerja Organisasi, Disiplin Kerja Pegawai serta Komitmen bersama di Lingkup Biro Perencanaan melalui Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 81/SJ.1/KP.810/I/2025 tanggal 7 Januari 2025;
3. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Triwulan I, II, III, IV, dan penilaian Final menggunakan aplikasi Kinerja BKN;
4. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi mereka; dan
5. Menjadikan IP ASN sebagai salah satu Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi setiap pegawai.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 12. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan mendorong kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, diklat, dan seminar-seminar yang relevan; memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kinerja; dan melakukan pemutakhiran data terkait riwayat pendidikan, pelatihan, seminar, dan *workshop* yang pernah diikuti oleh pegawai melalui aplikasi myASN secara berkala.

## **IK 15: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan**

### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

### B. Analisa Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Realisasi IKU terkait persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah tercapai 100% terhadap target tahunan dan jangka menengah yang ditetapkan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 136/SJ.2/RC.610/1/2026 tanggal 12 Januari 2025 perihal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan berhasil meraih capaian 100% bersama seluruh unit kerja Eselon II lingkup Setjen.

**Tabel 3.24 Capaian IKU 15**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan								
IKU-15:		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan								
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi ini telah mencapai target tahunan dan jangka menengah pada Renstra Setjen 2025-2029 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Biro Perencanaan berhasil mempertahankan capaian ini selama 5 tahun berturut-turut.

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung capaian IKU ini, Biro Perencanaan telah melakukan:

1. Penyiapan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan permintaan Tim BPK.
2. Penyiapan dokumen tindak lanjut atas temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK.
3. Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkup Biro Perencanaan.

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

Dengan komitmen yang tinggi, Biro Perencanaan terus menjaga kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal dalam penyelesaian temuan BPK. Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 12. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas temuan BPK serta menjaga kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal dalam penyelesaian temuan BPK.

## **IK 16: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan**

#### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dihitung Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal berupa Audit, Reviu, dan Evaluasi oleh Unit Kerja pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Desember 2025.

#### **B. Analisa Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil memperoleh capaian atas IKU ini sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU triwulanan dengan target sebesar 85% di tiap triwulan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 103/SJ.2/RC.610/1/2026 tanggal 9 Januari 2025 Hal Capaian IKU

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, Biro Perencanaan berhasil meraih capaian 100% bersama dengan 8 Unit Kerja Eselon II lain lingkup Setjen. Capaian ini meraih 112,4% dari target pada rancangan awal Renstra. Realisasi ini telah mencapai target tahunan dengan tingkat capaian sebesar 117,65% dan jangka menengah pada Renstra Setjen 2025–2029 dengan tingkat capaian sebesar 112,36%.

**Tabel 3.25 Capaian IKU 16**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan								
IKU-16:		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan								
Realisasi 2019–2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025–2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	100	100	100	100	85	100	117,65	89	112,36

Dengan hasil capaian ini, Biro Perencanaan menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan menindaklanjuti 31 rekomendasi hasil pengawasan yang telah diberikan, yang berfokus pada perbaikan kinerja di berbagai aspek organisasi.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.26 Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Biro HKLN	0	0	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
9	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
	<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2025 Hal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 12. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi kinerja pencapaian IKU ini di periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK KKP.

**Laporan Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan**

**IK 17: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga**

**A. Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, terdapat 4 usulan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan kelautan dan perikanan pada tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan.

**B. Analisa Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil memperoleh capaian atas IKU ini sebesar 100%. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 50/SJ.4/TU.210/1/2026 tanggal 6 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, Biro Perencanaan berhasil meraih capaian 100% bersama dengan 14 Unit Kerja lain lingkup yang memiliki target penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP sampai dengan semester II tahun 2025. Realisasi ini telah mencapai target tahunan dan jangka menengah dengan tingkat capaian sebesar 100%.

**Tabel 3.27 Capaian IKU 17**

<b>Sasaran Kegiatan:</b>		<b>Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan</b>									
<b>IKU-17:</b>		<b>Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga</b>									
<b>Realisasi 2019-2024</b>						<b>Tahun 2025</b>			<b>Renstra Setjen 2025-2029</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Target 2029</b>	<b>% Capaian terhadap target akhir Renstra</b>	
-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

Berikut merupakan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan pada tahun 2025.

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
4. Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 telah resmi ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025

### **C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Dalam mendukung capaian IKU ini, Biro Perencanaan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi yang Efektif antara Biro Perencanaan dan Biro Hukum dalam mengidentifikasi, merancang, dan menyelesaikan penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga yang dibutuhkan.
2. Penyusunan kajian tertulis yang mendalam terhadap rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, guna memberikan landasan yang kuat dalam pembahasan dan penyusunan peraturan yang lebih lanjut;
3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dengan unit kerja Eselon I dan instansi terkait lainnya, untuk memperoleh masukan yang konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang diinginkan;
4. Penyusunan yang Tepat Waktu, memastikan setiap peraturan dapat diselesaikan dan diajukan sesuai jadwal tanpa ada keterlambatan.
5. Pemantauan Proses Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri secara berkelanjutan.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung pencapaian IKU ini sudah tercantum pada IKU 12. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

#### **D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Biro Perencanaan akan terus bekerja sama dengan Biro Hukum dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap program penyusunan peraturan perundang-undangan tetap sesuai target, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas proses penyusunan peraturan pada tahun-tahun mendatang.

## **IK 18: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan**

#### **A. Definisi Indikator Kinerja**

IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan merupakan capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan. Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Perencanaan.

#### **B. Analisa Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan mencatatkan realisasi anggaran sebesar 94,75%. Untuk tahun 2025, Biro Perencanaan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp62.494.539.000 dengan blokir sebesar Rp762.845.000, sehingga pagu efektif Biro Perencanaan adalah sebesar Rp61.731.694.000. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum nomor 65/SJ.6/KU.130/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 Hal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 Lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2025 tercatat sebesar Rp60.407.471.363 atau 97,85% dari pagu efektif. Realisasi ini telah melampaui target tahunan dan target jangka menengah pada Renstra Setjen Tahun 2025-2029 dengan tingkat capaian sebesar 103% dan meningkat sebesar 0,25 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Biro Perencanaan pada peringkat kedelapan dari sembilan Eselon II di lingkup Satker Biro Umum dan PBJ yang diukur realisasinya.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.28 Capaian IKU 18**

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan								
IKU-18:		Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan								
Realisasi 2019-2024						Tahun 2025			Renstra Setjen 2025-2029	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2029	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	99,18	99,70	94,75	95	97,85	103,00	95	103,00

### C. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian IKU ini, Biro Perencanaan telah menyelesaikan 406 SPTB, melakukan revisi anggaran dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) sebanyak dua belas kali, serta melaksanakan rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran pembangunan SKPT Hibah Pemerintah Jepang setiap bulan.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, jaringan internet, media penyimpanan daring, serta perangkat lunak konferensi video. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Biro Perencanaan tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit organisasi dan pihak terkait melalui korespondensi resmi serta rapat pembahasan secara daring.

### D. Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya optimalisasi pencapaian IKU pada periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi dan deviasi penyerapan anggaran, serta melakukan penyesuaian RKA-K/L secara tepat waktu sesuai kebijakan dan kebutuhan, baik internal maupun eksternal.

## 3.2 Kinerja Anggaran

Biro Perencanaan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama; Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN; dan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum yang dijabarkan dalam rincian output yaitu: (a) Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga; (b) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder KP; (c)

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

Layanan Perencanaan dan Penganggaran; (d) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; (e) Layanan Perkantoran ; (f) Layanan Umum.

Biro Perencanaan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp62.494.539.000 dengan blokir sebesar Rp762.845.000, sehingga pagu efektif Biro Perencanaan adalah sebesar Rp61.731.694.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.407.471.363 atau sebesar 97,85% dari pagu efektif. Alokasi anggaran dan realisasi pada Tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025**

Uraian	Pagu	Blokir	Pagu Tersedia	Realisasi	%
Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	205.044.000	0	205.044.000	204.743.824	99,9
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder KP	2.935.223.000	762.845.000	2.172.378.000	2.167.526.247	99,8
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	57.608.725.000	0	57.608.725.000	56.279.187.472	97,7
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	234.388.000	0	234.388.000	248.258.500	105,9
Layanan Umum	485.087.000	0	485.087.000	484.922.013	100,0
Layanan Perkantoran	1.026.072.000	0	1.026.072.000	1.022.833.307	99,7
	<b>62.494.539.000</b>	<b>762.845.000</b>	<b>61.731.694.000</b>	<b>60.407.471.363</b>	<b>97,85</b>

Sumber: Diolah dari Aplikasi SAKTI Kemenkeu, Januari 2026

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2025 adalah sebesar 11,53%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan melalui koordinasi dan integrasi antar tim kerja dan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Biro Perencanaan  
Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	Anggaran Efektif	Realisasi	Realisasi (%)	%NPSS x Anggaran per Sasaran	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7 ((3)%*(4))	8 ((7)-(5))
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja Organisasi	110,7	60.015.491.000	58.694.972.219	97,80%	66.437.148.537	7.742.176.318
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga	114,94	205.044.000	204.743.824	99,85%	235.677.574	30.933.750
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan	106,11	1.511.159.000	1.507.755.320	99,77%	1.603.490.815	95.735.495
			61.731.694.000	60.407.471.363	97,85%	68.276.316.926	7.868.845.563
						<b>%Efisiensi Anggaran ((8):(7)x100%)</b>	<b>11,53%</b>

Sumber: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, 2025

### 3.3 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai Feedback Perbaikan Kinerja di Tahun 2026

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, Biro Perencanaan berhasil mencapai target pada tahun ini. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, telah disusun rencana aksi dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan kinerja organisasi yang telah diraih. Berikut merupakan *feedback* bagi perbaikan kinerja di tahun 2026.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

**Tabel 3.31 Feedback Perbaikan Kinerja di Tahun 2026**

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Triwulan IV			Feedback	
			Target	Capaian	%		
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja				110,70		
IK.1	Nilai SAKIP KKP	nilai	85	85	87,15	102,53	
IK.2	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk	persen	≤ 59	≤ 59	45	120,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi dan koordinasi perencanaan proyek Pinjaman Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pemenuhan kesiapan proyek (<i>project readiness</i>).</li> <li>Koordinasi Eselon I selaku PIC Proyek dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh persetujuan pimpinan.</li> </ul>
IK.3	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister	persen	95	95	220	120,00	
IK.4	Capaian IKU KKP	persen	75	75	85,71	114,28	
IK.5	Capaian Prioritas Nasional KKP	persen	91	91	98,77	108,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan progres mingguan program prioritas agar dilakukan pada hari kerja pertama di minggu berikutnya sehingga update semua program terekapitulasi dengan baik</li> <li>Perlu dilakukan pengumpulan data dengan kunjungan lapangan untuk menghitung dampak ekonomi pasca intervensi</li> <li>Perlu dilakukan penambahan jumlah SDM dan manajemen pembagian beban kerja SDM Move Program Prioritas</li> </ul>
IK.6	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada PM Maturitas SPIP KKP	nilai	1,8	1,8	2	111,11	
IK.7	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor	persen	83	87	120	120,00	Perlu dilakukan pembahasan dengan masing-masing eselon 1 untuk update target pada RAN.
IK.8	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP	indeks	92	92	93,17	101,27	Perlu dibuat sistem yang dapat memonitor proses revisi dari seluruh satker di KKP baik itu revisi POK, Kanwil, Dit. PA, atau DJA.
IK.9	Nilai PM SAKIP Setjen	nilai	87	87	89,6	102,99	
IK.10	Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru	persen	10	19,50	12,75	120	
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga				114,94		
IK.11	Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas	persen	87	87	100	114,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada <i>drafting</i> atau perpanjangan kerja sama selanjutnya, perlu disusun ruang lingkup kerja sama yang mendukung program prioritas.</li> <li>Perlu dilakukan konfirmasi dan update berkelanjutan pada matriks Pemantauan Ruang Lingkup Dokumen Kerja Sama.</li> </ul>
SK.3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan				106,11		
IK.12	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan	persen	85	85	100	117,65	
IK.13	Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan	nilai	87	87	89,25	102,59	
IK.14	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan	indeks	82	82	87,36	106,54	
IK.15	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan	persen	100	100	100	100,00	
IK.16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan	persen	85	85	100	117,65	
IK.17	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	persen	100	100	100	100,00	
IK.18	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan	persen	95	95	97,85	103,00	

Sumber: Evaluasi Rencana Aksi atas PK Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2025

## **Laporan Kinerja Tahun 2025**

### **Biro Perencanaan**

#### **3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Nomor B.913/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 11 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, Biro Perencanaan telah menuntaskan semua rekomendasi Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Perencanaan Tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 110,58 dibandingkan Tahun 2024 sebesar 107,94 atau naik sebesar 2,4%.
2. Biro Perencanaan telah melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur melalui koordinasi dengan, baik secara formal maupun informal.
3. Biro Perencanaan telah mengembangkan inovasi Coaching Clinics SAKIP melalui layanan konsultasi dan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Setjen dan KKP dan inisiasi pelatihan SAKIP di Lingkungan KKP melalui platform emilea.

## BAB IV

### PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA

#### 4.1 Prestasi

Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasi dan Piagam Penghargaan kepada Biro Perencanaan atas capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi ke-2 Triwulan I Tahun 2025 dengan nilai 117,65 di lingkup Sekretariat Jenderal.



**Gambar 4.1 Piagam Penghargaan atas Capaian NKO Tertinggi ke 2 Lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan I Tahun 2025**

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2025

#### 4.2 Kinerja Lainnya

Biro Perencanaan pada tahun 2025 telah mengembangkan beberapa inovasi dalam mendukung pencapaian kinerja baik Biro Perencanaan maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Inovasi tersebut antara lain:

1. *Coaching Clinics* SAKIP, yaitu layanan konsultasi dan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Setjen KKP dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sesuai prinsip-prinsip SAKIP.

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan



**Gambar 4.2 Flyer Coaching Clinics SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal**

Sumber: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, 2025

2. Penambahan *barcode* ISSN (*International Standar of Serial Number*) pada Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulanan Setjen. ISSN merupakan rangkaian nomor unik yang menunjukkan identitas suatu terbitan berkala, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.
3. Evaluasi Rencana Strategis Setjen Tahun 2020-2024 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis Setjen dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029
4. Dasbor Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai instrumen Dasbor dapat diakses pada tautan: <https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/pemadanan-kusuka/p3ke>
5. Pelaporan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 yang merupakan mandat Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023, Kepmen KP 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Kepmen KP 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

6. Dasbor Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri pada tautan [bit.ly/DasborProgresPHLNKKP](https://bit.ly/DasborProgresPHLNKKP)
7. Dasbor Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Tahun 2025 <https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/64e17baf-3cd6-48e1-9b735bcf197b3a87/page/YJLMF>
8. Kegiatan Validasi Perencanaan Unit Organisasi Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Lingkup Setjen terutama aspek perencanaan kinerja
9. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Triwulanan Unit Organisasi Eselon II Lingkup Setjen Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Lingkup Setjen terutama aspek pelaporan kinerja
10. Inisiasi Pelatihan SAKIP di lingkungan KKP melalui aplikasi e-milea KKP
11. Penyusunan Pedoman Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Lingkup Setjen Tahun 2025
12. Penyampaian Laporan bulanan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru KKP Tahun 2024 dan 2025 kepada Menteri
13. Dasbor Penyaluran dana bergulir LPMUKP Sebagai instrumen pemantauan berkala penyaluran dana bergulir KK sehingga pimpinan mengetahui progres penyaluran dana bergulir (jumlah dana yang telah digulirkan, jumlah kab/kota, jumlah debitur dan jumlah pemanfaat)
14. Layanan Pengelolaan Kinerja KKP melalui Aplikasi Kinerjaaku yang menjadi percontohan untuk K/L lain yaitu eSAKIP Kementerian ATR BPN, eKinerja Badan Karantina Indonesia, E-SAKIP Badan Pangan Nasional, eKinerja KemenPORA, dan eSAKIP Kementan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, serta sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,53% dan berada dalam kategori "Istimewa". Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait pemenuhan indikator teknis tertentu yang bersifat kumulatif dan akan diukur pada akhir tahun.

#### **5.2 Tindak Lanjut**

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur
2. Memantau pelaksanaan Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja Kedepan
3. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja

# Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025



#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andy Artha Donny Oktopura**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Perencanaan

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Andy Artha Donny Oktopura

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	2.252.372.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	13.228.370.000
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	15.647.463.000
Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025		<b>31.128.205.000</b>


Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Perencanaan



✶ Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Andy Artha Donny Oktopura

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja Organisasi	1 Nilai SAKIP KKP (nilai)	85
	2 Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (%)	≤59
	3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister (%)	95
	4 Capaian IKU KKP (nilai)	75
	5 Capaian Prioritas Nasional KKP (nilai)	91
	6 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada PM Maturitas SPIP KKP (nilai)	1,8
	7 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor (%)	87
	8 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP (indeks)	92
	9 Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	87
	10 Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru (%)	19,5
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di bidang Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga	11 Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas (%)	87
3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan	12 Persentase pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas lingkup Biro Perencanaan (%)	85
	13 Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	87
	14 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	87
	15 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (%)	100
	16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (%)	85
	17 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (%)	100
	18 Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (%)	95

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 Revisi Desember



#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andy Artha Donny Oktopura**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Perencanaan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Andy Artha Donny Oktopura**

## Laporan Kinerja Tahun 2025

### Biro Perencanaan

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja Organisasi	1	Nilai SAKIP KKP (nilai)	85
		2	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (%)	<59
		3	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri KKP yang teregister (%)	95
		4	Capaian IKU KKP (nilai)	75
		5	Capaian Prioritas Nasional KKP (nilai)	91
		6	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (nilai)	1,8
		7	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor (%)	83
		8	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KKP (indeks)	92
		9	Nilai PM SAKIP Setjen (nilai)	87
		10	Persentase Peningkatan Anggaran Melalui Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif dalam rangka mendukung Ekonomi Biru (%)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga	11	Persentase Kontribusi Kerja Sama Bidang KP Terhadap Program Prioritas (%)	87
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan	12	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Zona Integritas Lingkup Biro Perencanaan (%)	85
		13	Nilai PM SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	87
		14	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	82
		15	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (%)	100
		16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (%)	85
		17	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (%)	100
		18	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (%)	95

## Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perencanaan

### Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	205.044.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	1.511.159.000
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	36.159.581.000
<b>Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025</b>		<b>37.875.784.000</b>

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Perencanaan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Andy Artha Donny Oktopura**